ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KONSERVASI MANGROVE DI DESA BANYUURIP : STUDI KASUS SINERGITAS PENGELOLAAN MANGROVE ANTARA PEMERINTAH KECAMATAN UJUNGPANGKAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK JAWA TIMUR

SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN

JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN

OLEH:

JANNATAN FIRDAUS

105080600111014

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014

ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KONSERVASI MANGROVE DI DESA BANYUURIP: STUDI KASUS SINERGITAS PENGELOLAAN MANGROVE ANTARA PEMERINTAH KECAMATAN UJUNGPANGKAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK JAWA TIMUR

SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN

JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Kelautan
Di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

OLEH:

JANNATAN FIRDAUS

105080600111014

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KONSERVASI MANGROVE DI DESA BANYUURIP: STUDI KASUS SINERGITAS PENGELOLAAN MANGROVE ANTARA PEMERINTAH KECAMATAN UJUNGPANGKAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK, JAWA TIMUR

Oleh :

JANNATAN FIRDAUS
NIM. 105080600111014

telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal 27 november 2014
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Dosen Penguji I	**Dosen Pembimbing I**
Dr. Ir. Guntur, MS	**Dr. H. RUDIANTO, MA**
NIP. 19580605 198601 1 001	**NIP. 195707151 98603 1 024**
Tanggal :	**Tanggal :**
Dosen Penguji II	**Dosen Pembimbing II**
Dwi Candra Pratiwi, S.Pi, M.Sc	**Dhira Khurniawan S., S.Kel, M.Sc**
NIK. 86011508120318	**NIP. 860 115 06 110319**
Tanggal :	**Tanggal :**

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr.Ir.Daduk Setyohadi, MP
NIP. 19630608 198703 1 003
Tanggal :

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Jannatan Firdaus

NIM : 105080600111014

Prodi : Ilmu Kelautan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Malang, 28 November 2014
Mahasiswa

Jannatan Firdaus
NIM. 105080600111014

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulisan laporan penelitian skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayahNya.
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kami dari orang jahiliah menjadi orang yang beriman serta bertawakal kepada Allah SWT
3. Drs. H. Choirul Anam, MM dan Dra. Suherminning Dyah, selaku Orang Tua yang sangat berjasa bagi saya sejak kecil, sehingga dapat menjadikan saya sebagai Sarjana Kelautan.
4. Muhammad Alex Amrullah, ST dan Indra Fariyanti, S.Pd, selaku kakak yang selalu mendukung dan membimbing saya sehingga dapat menjadikan saya menjadi Sarjan Kelautan.
5. Prof. Dr. Ir. Diana Arfiati, MS., selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Malang
6. Dr. Ir. Daduk Setyohadi, M.P, selaku Ketua Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, Malang
7. Ir. Bambang Semedi, M.Sc, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, Malang
8. Dr. H. Rudianto, MA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang memberi masukan, bimbingan dan arahan selama proses penyusunan laporan.

9. Dhira Khurniawan S, S.Kel, M.Sc, selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah memberi arahan, semangat, dan bimbingan selama proses penelitian skripsi hingga penyusunan laporan.
10. Elok Izra Yanuarita, S.Ip untuk segala kebaikan dan segala motivasi yang membuat saya dapat bersemangat dalam bekerja dan menyelesaikan kuliah.
11. Teman-teman dan adik-adik kos yang sangat luar biasa (Lapyasonta N, Hazreza Getarcita, Andika Pratama, Irfan Fardiansyah, Bagus Setiyono, Ibnu, Sandy, Agil, dan Bunder) yang terbaik selama saya mengerjakan skripsi sehingga dapat mengganggu dan menghambat saya dalam mengerjakan skripsi.
12. Para Dosen Ilmu Kelautan yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan dengan pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa.
13. Teman-teman MARCOPOLO (Ilmu Kelautan 2010) dan semua warga Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, baik kakak tingkat dan adik tingkat, atas bantuan, dukungan, motivasi, saran, dan pengalaman yang telah diberikan.

Malang, 28 November 2014

Penulis

RINGKASAN

JANNATAN FIRDAUS. Analisis Kelembagaan Pengelolaan Konservasi Mangrove Di Desa Banyuurip : Studi Kasus Sinergitas Pengelolaan Mangrove Antara Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah dan Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur (dibawah bimbingan **Rudianto** dan **Dhira Khurniawan Saputra**).

Pengelolaan wilayah pesisir di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tidak terlepas karena adanya hutan mangrove di dalamnya. Salah satu faktor terpenting dari rehabilitasi mangrove adalah adanya aspek kelembagaan, terutama yang muncul dari masyarakat. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan konservasi mangrove yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, serta untuk mengetahui sinergitas pengelolaan rehabilitai mangrove antara Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah dengan Pemerintah Kabupaten Gresik, dan strategi apakah yang digunakan untuk meningkatkan sinergitas anatara Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah dan Kabupaten Gresik. Penelitian dilakukan di Perairan Desa Banyuurip pada bulan Agustus-September 2014.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dan analisis SWOT. Analisis kualitatif tersebut dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk dapat menarik kesimpulan yang logis , sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian untuk mengetahui sinergitas antara Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah dan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah memiliki luasan 71,16 Ha dengan kerapatan masing-masing 38,62 Ha untuk mangrove jarang, 9,25 Ha untuk mangrove sedang, 23,29 Ha untuk mangrove rapat. Hasil pengelolaan konservasi mangrove termasuk upaya melakukan rehabilitasi mangrove di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah menunjukkan upaya penanganan yang lambat di mata masyarakat. Hal ini disebabkan karena penanganan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi mangrove melalui proses yang masih ditangani oleh SKPD secara penuh terkait di Pemerintahan Kabupaten Gresik. penanganan tersebut melekat juga aspek pendanaan yang dialokasiakan di APBD kabupaten Gresik setiap tahunnya. Penanganan yang masih terpusat di SKPD terkait di Pemkab Gresik ini menimbulkan presepsi negative di mata masyarakat khususnya masyarakat di Desa Banyuurip.

Sinergitas pengelolaan rehabilitasi mangrove antara pemerintah kecamatan Ujungpangkah dengan SKPD di pemerintah Kabupaten Gresik di Desa Banyuurip menunjukkan sinergitas belum berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahu 2008 tentang Kecamatan. Seharusnya berdasarkan penemuan penelitian ini, pemerintah Kabupaten Gresik memberikan pendelegasian kewenangankepada pemerintah Kecamatan Ujungpangkah untuk menangani proses pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi mangrove.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya laporan skripsi dengan judul "Analisis Kelembagaan Pengelolaan Konservasi Mangrove di Desa Banyuurip : Studi Kasus Sinergitas Pengelolaan Mangrove antara Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah dan Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur" dapat terselesaikan dengan baik di waktu yang tepat.

Laporan skripsi ini membahas Sinergitas Kelembagaan Pengelolaan Mangrove antara Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah dan Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan konservasi dan rehabilitasi mangrove yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dikawasan Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah dan untuk mengetahui strategi untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah Kecamatan Ujungpangkah dan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Tentu saja masih terdapat kekurangan dalam penulisan laporan skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan dapat menyempurnakan laporan ini sehingga nantinya bermanfaat bagi pembaca.Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan informasi yang berguna bagi pembaca.

Malang, 28 November 2014

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

UCAPAN TERIMAKASIH iii

RINGKASAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

Daftar Gambar x

Daftar Tabel xiii

BAB 1. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Tujuan 3

1.4 Manfaat 4

1.5 Waktu dan Tempat 5

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 7

2.1 Pendahuluan 7

2.2 Kebijakan Ekosistem Mangrove Sebagai Kawasan Konservasi 8

2.3 Degradasi Kualitas Lingkungan 10

2.4 Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah 11

2.5 Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove 11

2.6 Kendala Pelaksanaan Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove 13

2.7 Isu Kelembagaan Pengelolaan Mangrove 14

BAB 3. METODE PENELITIAN 15

3.1 Pendahuluan 15

3.2 Metode Pendekatan 15

3.3 Teknik Pengumpulan Data. 19

3.3.1 Data Primer 19

3.3.1.1 Pengambilan Sampel 20

3.3.1.2 Dokumentasi 20

3.3.2 Data Sekunder 21

3.4 Data dan Sumber Data 22
3.5 Metode Analisis Data 22
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 25
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 25
4.1.1 Kondisi Umum Mangrove di Kabupaten Gresik 26
4.1.2 Kondisi Mangrove di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah 27
4.1.3 Jenis Mangrove Di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah 29
4.2 Pendapat Masyarakat Kecamatan Ujungpangkah Mengenai Kondisi dan Peran Pemerintah Menangani Kerusakan Hutan Mangrove 31
4.3 Peran Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah Menangani Kerusakan Hutan Mangrove 36
4.4 Peran Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Penanganan Kerusakan Hutan Mangrove di Kecamatan Ujung Pangkah 43
4.5 Evaluasi Hasil Penelitian 48
4.5.1 Peran POKWASMAS di Kecamatan Ujungpangkah 48
4.5.2 Masyarakat Kecamatan Ujungpangkah 49
4.5.3 Peran Pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah Menangani kerusakan Hutan Mangrove. 51
4.5.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Daerah Kab. Gresik dan Pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah 54
4.6 Penyusunan Pohon Masalah 56
4.7 Analisis Tabel Urutan Masalah 57
4.8 Pengelolaan Konservasi Mangrove 58
4.9 Sinergitas Pengelolaan Rehabilitasi Mangrove Antara Pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah Dengan Pemkab Gresik Desa Banyuurip 59
4.10 Strategi Meningkatkan Sinergitas Antara Pemerintah Kabupaten Gresik Dan Pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah 61
4.10.1 Analisis Faktor Internal (IFAS) 63
4.10.2 Analisis Faktor Eksternal (EFAS) 66
4.10.3 Matriks Pembobotan Arahan IFAS dan EFAS 67
4.10.4 Matriks SWOT “Strategic Issues” 68
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 74
5.1 Kesimpulan 74
5.2 Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN 78

Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Lokasi 5
Gambar 2. Pandangan masyarakat terhadap kerusakan mangrove..... 31
Gambar 3. Penyebab kerusakan Mangrove..... 31
Gambar 4. Jenis Kerusakan Mangrove karena ulah manusia 32
Gambar 5. Peran Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah 32
Gambar 6. Pengetahuan masyarakat tentang program penanggulangan kerusakan hutan mangrove 33
Gambar 8. Pengetahuan masyarakat tentang program penanggulangan kerusakan hutan mangrove 34
Gambar 9. Penanggulangan kerusakan hutan mangrove..... 34
Gambar 10. Program Penanggulangan Kerusakan Mangrove oleh Pemerintah Kabupaten Gresik 35
Gambar 11. Koordinasi Pemkab Gresik dan Kecamatan Ujung Pangkah 35
Gambar 12. Tupoksi Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah menangani Persoalan Hutan Mangrove..... 36
Gambar 13. Sensitifitas Pemerintah Kecamatan Ujung pangkah menangani kerusakan hutan Mangrove 37
Gambar 14. Sumber pembiayaan Mengatasi Kerusakan Mangrove 37
Gambar 15. Pendelegasian dari Pemkab Gresik ke Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah 38
Gambar 16. Keberadaan Juklak dan Juknis Mengatasi Kerusakan Mangrove..... 39
Gambar 17. Perencanaan Program Kerusakan Mangrove oleh Pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah 39
Gambar 18. Asal Usul Program Penanggulangan Kerusakan Mangrove 40
Gambar 19. Koordinasi Program Penanggulangan Kerusakan Mangrove..... 40
Gambar 20. Bentuk Koordinasi Program Penanggulangan Kerusakan Mangrove 41

Gambar 21. Kenyamanan Pemerintah Kecamatan Terhadap Program Penanggulangan Kerusakan Mangrove 41
Gambar 22. Bentuk Kerjasama Perencanaan Program Penanggulangan Mangrove 42
Gambar 23. Pelaksanaan Program Penanganan Kerusakan Mangrove..... 42
Gambar 24. Tupoksi Pemerintah Menangani Kerusakan Hutan Mangrove 43
Gambar 25. Biaya Program Menangani Hutan Mangrove..... 43
Gambar 26. Sumber dana Penanganan Kerusakan Hutan Mangrove 44
Gambar 27. Ketersediaan Dana Penanganan Kerusakan mangrove 44
Gambar 28. Bentuk Program Penanganan Kerusakan Hutan Mangrove 44
Gambar 29. Tata Cara Pengerjaan Penanganan Kerusakan Hutan mangrove 45
Gambar 30. Akomodasi Substansi Proses Perencanaan Penanganan Kerusakan Mangrove 45
Gambar 31. Koordinasi Perencanaan Antara Pemkab Gresik dan Pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah 45
Gambar 32. Koordinasi Pelaksanaan Program..... 46
Gambar 33. Koordinasi Monitoring Hasil Pelaksanaan Kegiatan..... 46
Gambar 34. Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program..... 47
Gambar 35. Pendelegasian Penanganan Mangrove..... 47
Gambar 36. Pohon Masalah..... 56
Gambar 36. Penentuan nilai skor Berdasarkan skala Likert 57
Gambar 37. Panorama Pesisir Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik..... 90
Gambar 38. Kantor Kepala Desa Banyuurip..... 90
Gambar 39. Penebangan Kayu Mangrove 91
Gambar 40. Sampah Kerang Hijau di Desa Banyuurip di Kec. Ujungpangkah 91
Gambar 41. Jalan Menuju Kawasan Mangrove Kecamatan Ujungpangkah 92
Gambar 42. Pengisian Quisioner di Kantor Kecamatan Ujungpangkah..... 92

Gambar 43. Foto Bersama Bapak M. Tholib Selaku Wakil Ketua Pokwasmas sekaligus Sekertaris Rukun Nelayan Tirta Buana.....93

Gambar 44. Kegiatan Penanaman Mangrove Melibatkan Pengawasan Dari POKWASMAS, Nelayan Sari Laut Pangkahkulon dan BLH.....93

Gambar 45. Kegiatan Nelayan di Desa Banyuurip yang berlokasi di Kawasan Mangrove.....94

Gambar 46. Lokasi Budidaya Kerang Hijau di Perairan Desa Banyuurip 94

Gambar 47. Peta Kerapatan Mangrove 96

Daftar Tabel

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 6
Tabel 2. Penyusunan masalah 19
Tabel 3. Matriks Analisis SWOT untuk Rancang Strategi 19
Tabel 4. Jenis Data Primer dan Sekunder 22
Tabel 5. Kategori Mangrove di Desa Banyuurip 27
Tabel 6. Jenis Mangrove di Desa Banyuurip 29
Tabel 7. Permasalahan dan solusi pengelolaan konservasi mangrove di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah 58
Tabel 8. Matriks SWOT 62
Tabel 9. Matriks Faktor Strategi Internal (IFAS) 67
Tabel 10. Matriks Faktor Strategi Eksternal (EFAS) 68
Tabel 11. SWOT *"Strategic Issues"* 69
Tabel 12. Penilaian Alternatif Strategi 70
Tabel 13. Matriks Pembobotan SWOT 71

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki wilayah pesisir yang sangat potensial, karena memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km. Garis pantai sepanjang ini menyimpan potensi kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Potensi itu diantaranya potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), hutan mangrove dan terumbu karang, dan potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable resources*) seperti minyak bumi, gas, mineral dan bahan tambang lainya (Esdm, 2013). Selain menyediakan dua sumber daya tersebut, wilayah pesisir Indonesia memiliki berbagai fungsi seperti transportasi laut, pelabuhan, kawasan industri, jasa lingkungan, dan tempat pariwisata serta kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah.Salah satu ekosistem yang potensial dapat meningkatkan produktivitas perikanan adalah mangrove. Fungsi dan manfaat mangrove telah banyak diketahui, baik sebagai tempat pemijahan ikan-ikan di perairan, pelindung daratan dari abrasi oleh ombak, pelindung daratan dari tiupan angin, penyaring intrusi air laut ke daratan dan kadungan logam berat yang berbahaya bagi kehidupan, tempat singgah migrasi burung, dan sebagai habitat satwa liar serta manfaat langsung lainnya bagi manusia.

Dalam tiga dekade belakangan ini telah terjadi penurunan secara drastis luas kawasan hutan mangrove di Indonesia dari seluas 4,25 juta ha menjadi 3,7 juta ha, dan bahkan hanya sekitar 2,1 juta ha dalam keadaan utuh. Di luar kawasan diperkirakan terdapat 5,5 juta ha mangrove yang 4.8 juta ha di antaranya dalam keadaan rusak parah. Kerusakan ini lebih banyak disebabkan

oleh ulah tangan manusia yang kurang bijak dalam mengelolanya (Pusat Litbang Hutan dan Konservasi, 2010). Disamping itu Keberadaan ekosistem mangrove di Indonesia saat ini benar-benar telah pada posisi yang sangat menghawatirkan, mengingat untuk pemenuhan keragaman kebutuhan penduduk yang jumlahnya makin bertambah pesat ini telah pula merebak ke wilayah mangrove. Kehidupan modern dan kemudahan aksesibilitas hasil produksi ekosistem mangrove kepasaran serta pemanfaatan yang berlebihan tanpa memperhatikan kaedah kelestarian lingkungan telah mengakibatkan penurunan kuantitas maupun kualitasnya. Padahal ekosistem mangrove merupakan mintakat peralihan antara daratan dan lautan yang mempunyai perbedaan sifat lingkungan tajam, yang kelestariannya sangat rentan terhadap perubahahan lingkungan (Tomlinson, 1986).

Menjaga keseimbangan ekosistem pantai, diperlukan upaya-upaya untuk melindungi kelestarian hutan mangrove. Untuk mempertahankan kelestarian hutan mangrove diperlukan sistem pengelolaan yang memperhatikan prinsip kesinambungan fungsi hutan mangrove dan kesadaran, serta kesamaan persepsi berbagai pihak atas pentingnya hutan mangrove. Untuk itu salah satu faktor yang menjadi suksesnya rehabilitas mangrove adalah aspek kelembagaan, terutama yang muncul dari masyarakat.

Mengetahui sampai seberapa penting aspek kelembagaan masyarakat untuk menangani mangrove, diperlukan penelitian lebih mendalam tentang upaya-upaya pengelolaan konservasi mangrove. Untuk itu penelitian ini akan menfokuskan kepada desa Banyuurip di kecamatan Ujung pangkah, Kabupaten Gresik sebagai lokasi penelitian. Dasar pengambilan sampel di desa Banyuurip ini antara lain bahwa dikawasan itu masih ada tumbuhan mangrove dengan tingkat kerusakan mulai dari kerusakan sangat berat sampai kondisi mangrove yang baik.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan konservasi mangrove yang dilakukan pemerintah dan masyarakat d ikawasan Desa Banyuurip, Kecamatan Ujung pangkah, kabupaten Gresik;
2. Bagaimana sinergitas pengelolaan mangrove antara Pemerintah Kecamatan Ujung pangkah dengan Pemerintah kabupaten Gresik di Desa Banyuurip;
3. Bagaimana strategi meningkatkan sinergitas antara pemerintah kecamatan Ujung pangkah dengan Pemerintah kabupaten Gresik.

1.3 Tujuan

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengelolaan konservasi mangrove yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dikawasan Desa Banyuurip, Kecamatan Ujung pangkah, Kabupaten Gresik;
2. Mengetahui sinergitas pengelolaan rehabilitasi mangrove antara Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah dengan Pemerintah Kabupaten Gresik di Desa Banyurip;
3. Menyusun strategi meningkatkan sinergitas antara pemerintah Kecamatan Ujungpangkah dengan Pemerintah Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat

Manfaat dari Penelitian ini antara lain :

- Bagi Mahasiswa

  Memberikan tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan informasi dalam proses penelitian tentang analisis kelembagaan pengelolaan konservasi mangrove. Dengan demikian dapat memadukan antara teori yang diperoleh selama kuliah dengan penelitian yang dilaksanakan.

- Bagi Masyarakat

  Memberikan informasi tentang upaya pengelolaan konservasi mangrove melalui sinerjitas antara pemerintah kecamatan Ujung pangkah dengan pemkab Gresik. Apakah sinergitas tersebut sejalan dengan keinginan masyarakat.

- Bagi Instansi Terkait

  Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman dan sebagai bahan masukan yang berguna dalam penentuan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan di wilayah pesisir Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

1.5 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di daerah pesisir Kecamatan Ujung Pangkah, Jawa Timur pada bulan september 2014. Tabel 1 dibawah ini merupakan tabel pelaksanaan kegiatan selama melakukan Penelitian di sekitar pesisir Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

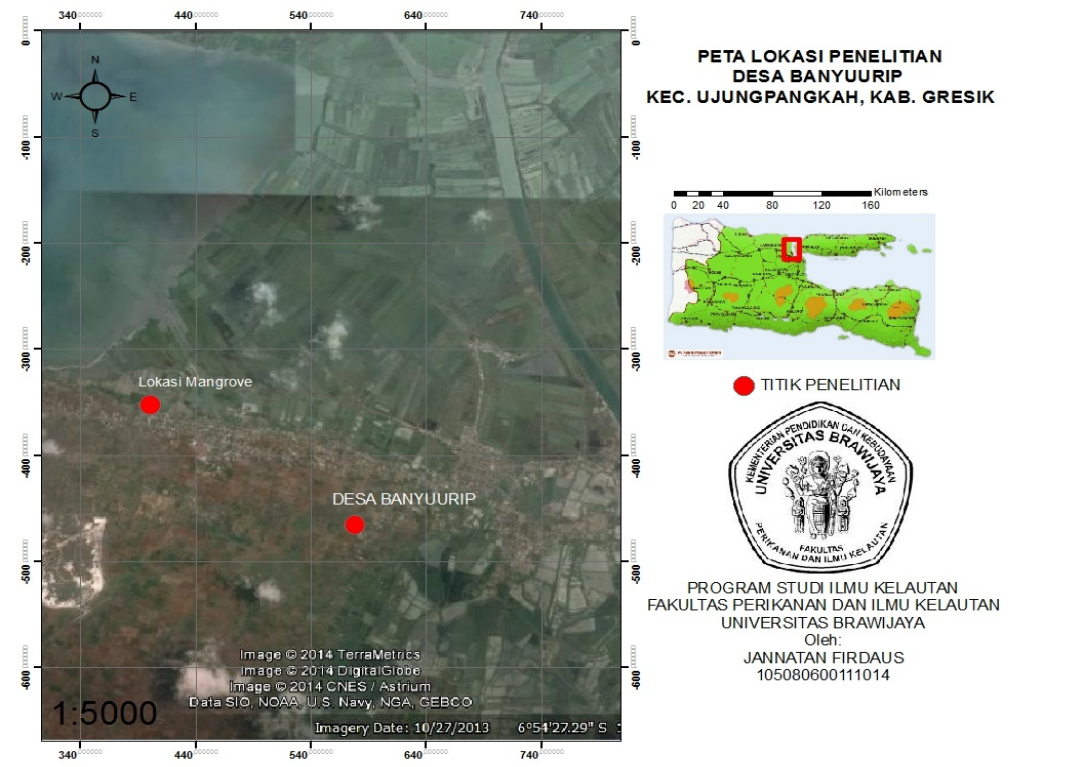

Gambar 1. Peta Lokasi

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No	Keterangan	Waktu											
		September				Oktober				November			
1	Penentuan Tempat Penelitian		■										
2	Pembuatan Proposal Penelitian			■	■								
3	Pengaambilan Data Penelitian				■	■							
4	Pengolahan Data Penelitian					■	■						
5	Pembuatan Laporan Penelitian					■	■	■					

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendahuluan

Kelestarian ekosistem mangrove sebagai bagian penting dari keberlangsungan wilayah pesisir di Indonesia saat ini masih terus terancam. Beberapa kebijakan terkait pengelolaan mangrove sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi, seiring dengan lahirnya beberapa kebijakan tersebut, sejumlah masalah terkait perusakan ekosistem mangrove masih terus berlangsung. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh adanya tumpang tindih kebijakan pada sektor yang sama, sehingga kebijakan tidak dapat diimplementasikan dengan baik.

Seperti diketahui, selama ini terjadi tumpang tindih kewenangan antar instansi pemerintah dalam pengelolaan hutan mangrove. Kementerian Dalam Negeri memberi perhatian kepada kawasan mangrove dari sisi kelembagaan pemerintah yang mengelola kawasan. Kementerian Kehutanan melihat hutan mangrove dari sudut pandang kehutanan. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tugas pokok dan fungsi yang menyangkut sumber daya pesisir, termasuk di dalamnya adalah mangrove. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup ikut terlibat karena kerusakan mangrove menjadi salah satu kriteria baku kerusakan ekosistem dan merupakan instrumen pencegahan dan indikator pencemaran.

Ekosistem mangrove sudah dilihat sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat, produktif, bernilai dan tidak tersulihkan. Menyadari hal tersebut, beberapa instansi pemerintah seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BAPPENAS, serta lembaga lain dari unsur perguruan tinggi dan LSM memberikan perhatian lebih terhadap mangrove. Saat ini, instansi-instansi dan

lembaga-lembaga tersebut telah membentuk tim Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN) untuk menyikapi segala hal yang terkait dengan mangrove, seperti isu dan masalah yang sedang menonjol dan mendesak untuk dicari solusinya, serta koordinasi antar instansi dan kelembagaan yang perlu diperkuat (Rudi Haryanto, 2008).

2.2 Kebijakan Ekosistem Mangrove Sebagai Kawasan Konservasi

Kebijakan pemerintah yang melihat ekosistem mangrove sebagai sebuah kawasan konservasi telah dimulai pada tahun 1990 ketika dikeluarkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kebijakan tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembentukan sebuah kawasan menjadi kawasan konservasi dimana ekosistem mangrove adalah salah satu kawasan yang banyak ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Akan tetapi, UU No. 5/1990 ini lebih berfokus pada sumber daya alam dan ekosistem di kawasan daratan, dan hanya sedikit yang di kawasan pesisir dan laut, termasuk mengenai kawasan ekosistem mangrove.

Pada tahun yang sama, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Terdapat perbedaan klasifikasi bagi kawasan pantai berhutan bakau dan sempadan pantai dalam Keppres No. 32/1990 dengan UU No. 5/1990. Dalam UU No. 5/1990 kedua kawasan tersebut dikategorikan sebagai kawasan konservasi, sementara di dalam Keppres No. 32/1990 dimasukan sebagai kawasan lindung sebagaimana tertulis pada pasal-pasal berikut : Pasal 3 : kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi 1) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, 2) kawasan perlindungan setempat, 3) kawasan suaka alam dan cagar budaya, 4) kawasan rawan bencana alam.

Pasal 5 : kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari 1) sempadan pantai, 2) sempadan sungai, 3) kawasan sekitar danau/waduk, 4) kawasan sekitar mata air. Pasal 6 : kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari 1) kawasan suaka alam, 2) kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, 3) kawasan pantai berhutan bakau, 4) taman nasional, taman hutan raya menunjukkan bahwa mangrove memiliki nilai penting sehingga diatur dalam kebijakan untuk dilindungi dalam konservasi ekosistem mangrove itu sendiri atau terintegrasi dalam kawasan konservasi perairan, dan taman wisata alam, 5) kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Pengklasifikasian yang sama dengan Keppres No. 32/1990 juga tertuang dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam kebijakan yang mengatur penataan ruang ini, kawasan pantai berhutan bakau dan sempadan pantai dikategorikan sebagai kawasan lindung serta dimanatkan untuk dijadikan sebagai bagian dalam penataan ruang suatu wilayah.

Pada tahun 2007, diterbitkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 mengenai Konservasi Sumber Daya Ikan. Kebijakan tersebut mendeskripsikan bahwa konservasi ekosistem dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan, dimana salah satunya adalah ekosistem mangrove. Karena itulah,bersama dengan ekosistem lainnya yang terkait dengan sumber daya ikan, ekosistem mangrove dapat juga ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan.

Kebijakan pemerintah yang khusus mengatur tentang kawasan konservasi di wilayah pesisir adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2008 mengenai Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kebijakan ini menegaskan bahwa ekosistem pesisir dan sempadan pantai sebagai sebuah kawasan konservasi yang dilindungi,

dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/2008 ini juga menyebutkan pengajuan usulan kawasan konservasi dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan hukum, pemerintah atau pemerintah daerah kepada Bupati/Walikota, Gubernur atau Menteri. Pada prosesnya, kawasan konservasi akan dicadangkan oleh pemerintah daerah dan ditetapkan sebagai kawasan konservasi nasional oleh Kementerian. Pada pasal 4 peraturan ini, pembagian kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dibagi menjadi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), Kawasan Konservasi Maritim (KKM), Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan sempadan pantai.

2.3 Degradasi Kualitas Lingkungan

Menurut Dahuri (2008), degradasi kualitas lingkungan yang sering terjadi pada kawasan pesisir adalah penurunan areal mangrove. Dimana menyempitnya areal tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal, baik akibat dari kegiatan manusia maupun alam. Akan tetapi yang terjadi di wilayah pesisir Indonesia saat ini adalah penurunan areal mangrove akibat dari kegiatan manusia terutama dalam bidang ekonomi. Kegiatan manusia untuk melakukan alih fungsi kawasan hutan mangrove menjadi areal pengembangan rumah, kegiatan - kegiatan komersial, industri dan pertanian. Selain itu, meningkatnya permintaan terhadap produksi kayu menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap hutan mangrove. Kegiatan lain yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove cukup besar adalah pembukaan tambak-tambak untuk budidaya

perairan tersebut memberikan kontribusi terbesar dalam kerusakan ekosistem mangrove.

2.4 Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah

Secara umum, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 17 dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam meliputi pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, pelestarian dan perijinan. Sementara itu, di Pasal 18 didefinisikan bahwa wilayah kelola laut kewenangan provinsi adalah 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas, dan sepertiganya adalah wilayah kelola laut kewenangan kabupaten/kota. UU 32/2004 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam dimana salah satunya adalah pelestarian. Terkait dengan wilayah pesisir, kebijakan ini mengatur bahwa daerah pesisir sebagian besar termasuk ke dalam wilayah pengelolaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Implikasi negatif dari otonomi ini adalah apabila daerah berlomba untuk mengeksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan maka tekanan bagi wilayah pesisir akan semakin meningkat.

2.5 Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove

Secara rancangan teknis pengelolaan hutan mangrove, sebagai berikut :

1. Penataan zona: untuk meminimalkan kerusakan dan melestarikan fungsi ekologis dan ekonomis kawasan.
2. Reboisasi: penanaman kembali area mangrove dengan tumbuhan yang sesuai.

3. Pengembangan mina hutan: pemanfaatan hutan mangrove untuk usaha perikanan dengan mempertimbangkan kelestarian area tersebut.
4. Pembentukan kelembagaan: perlu dibentuk suatu lembaga yang jelas untuk menangani kawasan mangrove secara menyeluruh.

Penataan zona: Kawasan hutan mangrove dibagi menjadi zona pemanfaatan dan zona perlindungan (konservasi). Reboisasi: mengembalikan mangrove ke kondisi semula (ex. Daerah mangrove yg terdiri dari 80% tambak dan 20% hutan dirubah menjadi 20% tambak dan 80% hutan).

Supaya penebangan hutan mangrove dapat dilakukan dengan baik, dapat diterapkan beberapa cara :

1. Tahap penebangan terakhir dilakukan 5 tahun setelah dimulainya penebangan
2. Pada area penebangan harus disisakan pohon induk sebanyak 64 – 100 pohon/ hektar (jumlah pohon tergantung dari tingkat kesuburan lahan).
3. Tebang habis dalam 2 tahap. Tebangan pertama mencakup 40% dari total tegakan dan sisanya ditebang dalam waktu 2 – 5 tahun, tergantung sukses atau tidaknya proses pemudaan hutan.
4. Sistem 2 tajuk: penebangan pertama 50% dari total tegakan dan sisanya ditebang 15 – 20 tahun kemudian setelah anakan mangrove besar.

Untuk menunjang suksesnya pengelolaan konservasi mangrove, maka perlu dilakukan hal hal sebagai berikut :

1. Ada batas area yang tidak boleh ditebang, yaitu di daerah garis pantai dan pinggir sungai. Fungsinya untuk perlindungan pantai dari abrasi
2. Ada pengaturan waktu dan tahap pelaksanaan pekerjaan sebelum dan sesudah penebangan/ eksploitasi
3. Tempat-tempat yang kosong harus disulam/ disisip
4. Ada batas ukuran pohon yang boleh ditebang atau dijadikan pohon induk.

2.6 Kendala Pelaksanaan Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove

Kendala yang dihadapi untuk mensukseskan pengelolaan konservasi mangrove:

1. Secara teknis dilapangan, kendala yang dihadapi terkait kedalaman air yang lebih dari 1 m akan menyulitkan penanaman bibit mangrove. Solusi: bibit mangrove ditanam dalam bambu berisi lumpur yang ditancapkan ke substrat.
2. Faktor alam, sebagai contoh abrasi (tidak adanya lumpur untuk menanam bibit mangrove). Solusi: dipasang “groin” dari batu atau cerucuk bambu untuk menahan lumpur agar tidak hanyut ke laut.
3. Faktor ekonomi untuk pengembangan mina hutan (Sylvofishery) memerlukan lahan mengingat hanya 20% dari kawasan hutan mangrove yang boleh digunakan untuk tambak.
4. Faktor partisipasi masyarakat yang tidak dioptimalkan perannya, sehingga masyarakat menjadi apatis dan tidak memiliki rasa memiliki;
5. Faktor Budaya terutama terkait dengan penghormatan adat istiadat yang seringkali diabaikan.

2.7 Isu Kelembagaan Pengelolaan Mangrove

Isu Kelembagaan yang diidentifikasi meliputi:

a) Koordinasi diantara lembaga terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove belum efektif.
b) Kebijakan antar sektor dalam pengelolaan ekosistem mangrove masih belum sinergis.
c) Kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang telah ada belum berkembang dan berfungsi secara optimal.
d) Kurangnya kapasitas pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder terkait dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove
e) Belum terintegrasinya data ekosistem mangrove secara nasional

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendahuluan

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya untuk memperoleh pemecahan suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, analisis dan konstuktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Fungsi penelitian ini adalah secara induktif mencari jawaban terhadap kelembagaan khususnya hubungan antara pemerintah kabupaten Gresik dengan pemerintah kecamatan Ujungpangkah. Hal ini didasarkan kepada Undang-Undang no. 1 tahun 2014 terkait bab 2 pasal 4 butir 4 berbunyi menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan pemeritah daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan Pulau-pulau kecil. Berdasarkan hal tersebut diatas, akan diteliti tentang kelembagaan antara pemerintah daerah kabupaten Gresik dengan Pemerintah kecamatan Ujungpangkah dalam mengelola mangrove.

3.2 Metode Pendekatan

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode RRA (*Rapid Rural Appraisal*) dan PRA (*Paricipatory Rural Apparaisal*). Secara harfiah metode ini dapat diartikan sebagai: pengkajian pedesaan dan atau pesisir secara partisipatif. Menurut Robert Chambers (yang mengembangkan metode ini) mengartikan sebagai: sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat pedesaan dan atau pesisir untuk turut serta meningkatkan dan mengkaji pengetahuan mereka mengenai hidup dan keadaan mereka sendiri agar meraka dapat

menyusun rencana dan tindakan pelaksanaannya. (Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *et al*. 2006).

Pada buku pertamanya itu, Chambers memperkenalkan metode rapid rural appraisal (RRA) sebagai alternatif bagi para praktisi pembangunan yang memerlukan sebuah metodologi "penelitian" yang bisa membantu mereka memahami masyarakat secara cepat, dengan informasi aktual, dan biaya murah, serta bisa mengajak masyarakat sebagai pelaku penelitian itu sendiri. Sedangkan pada bukunya yang kedua (Chambers, 2001), Chambers menggunakan istilah *participatory rural appraisal* (PRA) untuk menggantikan RRA. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa RRA dan PRA adalah bentuk aplikasi pemikiran Robert Chambers yang berkembang terus, terutama pemikiran tentang bagaimana seharusnya "orang luar" (para "profesional") bekerja di masyarakat dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pembangunan pedesaan. Dengan demikian, RRA bersifat ekstraktif atau merupakan penggalian infromasi (dalam pengertian: merupakan penilitian yang dikerjakan oleh luar) sedangkan PRA merupakan proses pembelajaran (dalam pengertian: analisis situasi dan persoalan untuk mengembangkan agenda aksi oleh masyarakat sendiri).

Metode ini bukan sekedar pengkajian, melainkan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses kegiatan sejak mulai mengenal kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai mengevaluasi kegiatan. Metode ini juga bukan saja untuk masyarakat pedesaan, melainkan juga untuk perkotaan dan termasuk juga masyarakat pantai atau masyarakat pesisir.teknik-teknik PRA/RRA sebagai alat diskusi dengan masyarakat, misalnya seperti :

- Mengembangkan rancangan pengkajian wilayah
- Mengembangkan alat-alat pengkajian wilayah / penerapan PRA.
- Menyampaikan tujuan pengkajian kepada masyarakat

• Menyampaikan cara dan proses pengkajian kepada masyarakat.

• Memfasilitasi kegiatan pengkajian berasama masyarakat.

• Mengalihkan keterampilan menganalisis kepada masyarakat.

• Mengalihkan peran fasilitator,sedikit demi sedikit kepada masyarakat,

• Menengahi perbedaan pendapat dan perselisihan.

• Memfasilitasi perencanaan kegiatan.

• Menyusun hasil pengkajian untuk laporan.

• Menyampaikan hasil pengkajian guna ditindaklanjuti.

Ada beberapa teknik partisipatif dalam metode PRA/RRA meliputi: (1). Metode kelompok yang meliputi: diskusi kelompok terfokus dan Curah Pendapat atau brainstorming; (2). Survey dan wawancara yang meliputi: Wawancara semi terstruktur dan Survey rumah tangga; (3) Matriks meliputi: Ranking masalah dan Ranking sosial ekonomi dan Analisis SWOT; (4). Visualisasi dan diagram hubungan, meliputi: pohon masalah dan diagram venn; (5). Metode Tempo meliputi: Kalender musim, Lintasan sejarah,aAktivitas harian, transek sejarah/kalender sejarah, garis kecenderungan (Trend); (6) Metode Spasial, meliputi: pemetaan partisipatif, Transek plot mangrove.

Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dimodifikasi dan dipilih dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Mengingat penelitian ini akan meneliti tentang sinergitas. Maka teknik yang dipilih meliputi: Metode survey dan wawancara, pembuatan matriks dan analisis SWOT.

Metode survey dan wawancara meliputi: berdiskusi dengan pemerintah Kabupaten Gresik dan pemerintah kecamatan Ujung Pangkah termasuk masyarakat, dan curah pendapat (*brain storming*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan dan berdiskusi dengan pemerintahKab. Gresik dengan pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah ditambah dengan masyarakat tentang bagaimana program pemerintah mengelola konservasi mangrove;
2. Menentukan target yang akan diwawancarai (Misalnya: untuk pemerintahan Kab Gresik target groupnya adalah Bappeda, Dinas Perikanan dan kelautan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas kehutanan. Untuk pemerintah kecamatan Ujung pangkah kelompok sasaran adalah camat, kasi lingkungan hidup dan kasi terkait dengan mangrove. Sedang untuk masyarakat meliputi kelompok sasaran adalah: nelayan, pengumpul ikan, istri nelayan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aparat desa, pengusaha desa). Hasil diskusi tersebut kemudian didiskusikan dengan kepada kepala desa tentang peran pemerintah menangani pengelolaan konservasi mangrove.
3. Merencanakan jadwal kegiatan untuk survey dan wawancara, menyusun dan meng “update” questioner apabila diperlukan disesuaikan dengan situasi;
4. Survey dan wawancara yang dilakukan menggunakan questioner dengan sistem tertutup dan terbuka. Daftar pertanyaan dapat dilihat dalam lampiran.

Langkah selanjutnya menyusun matriks berdasarkan:

1. *Ranking* masalah. Untuk itu akan disusun pohon masalah untuk mengetahui masalah kerusakan mangrove yang sebenarnya.

Pengertian analisis pohon masalah:

a) Analisis pohon masalah merupakan suatu alat atau teknik atau pendekatan untuk mengidentifikasi dan menganalis masalah.
b) Analisis pohon masalah menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat dari beberapa faktor yang saling terkait.
c) Alat atau teknik analisis pohon masalah umumnya digunakan pada tahap perencanaan.

2. Penyusunan masalah diikuti dengan penyusunan tabel ranking masalah, seperti dibawah ini:

Tabel 2. Penyusunan masalah

Masalah	Luas Masalah	Akibat	Kemunculan	Skor	Ranking

3. Menyusun analisis SWOT. Analisis SWOT ini Untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang dan mencari jalan bagaimana untuk mengoptimalkannya, serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman supaya, dapat dicari cara mengatasinya. Hasil analisis SWOT ini merupakan salah satu bagian dari penyusunan rencana strategis.

Tabel 3. Matriks Analisis SWOT untuk Rancang Strategi

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman

3.3 Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang sesuai dengan metode pendekatan. Teknik pengumpulan data adalah dengan mengklasifikasikan data terlebih dahulu yaitu data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan mengamati keadaan lapang. Data primer terdiri dari dari hasil wawancara dengan aparatur pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah kecamatan Ujung pangkah. Data yang dikumpulkan terkait dengan:

a) Data pelaksanaan program pengelolaan konservasi mangrove secara seris;

b) Data tentang koordinasi antara pemkab Gresik dengan pemerintah dibawahnya yaitu pemerintah kecamatan Ujung pangkah;

c) Data hasil observasi tentang kerapatan Mangrove didaerah penelitian termasuk jenis-jenis mangrove yang ada;

d) Wilayah yang menjadi sasaran penanaman kembali mangrove dan konservasi mangrove dalam kurun waktu 3 tahun sebelumnya.

e) Upaya-upaya partisipasi masyarakat menangani kerusakan mangrove;

f) Tingkat keberhasilan dan kegagalan program penanaman mangrove untuk konservasi.

Pengamatan mangrove dilakukan secara visual dengan membawa literatur tentang jenis-jenis mangrove untuk mengetahui jenis-jenis mangrove yang terdapat di lokasi penelitian yaitu desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.

3.3.1.1 Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan tentang kerusakan mangrove dan kawasan yang pernah mendapatkan rehabilitasi mangrove. Sampel yang akan diambil sebanyak 25 orang dengan rincian: 15 orang dari unsur Pemkab Gresik, 7 orang dari Pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah, 3 orang dari Pemerintah Desa Banyuurip dan 5 orang dari unsur masyarakat.

3.3.1.2 Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu seperti: tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang yang merupakan bentuk dari dokumen (Sugiyono, 2010). Penelitian ini menggunakan

dokumentasi berupa pengambilan gambar dari beberapa contoh kegiatan wawancara atau melakukan "*group discussion*".

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Sumber sekunder berisi data dari tangan kedua yang bagi peneliti tidak mungkin berisi data yang seasli sumber data primer (Surakhmad, 1985).

Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan cara mencari di literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan analisis kelembagaan untuk pengelolaan konservasi mangrove.

3.4 Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang akan diambil dilapangan baik untuk data sekundar maupun data primer dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Jenis Data Primer dan Sekunder

No	Jenis Data	Sumber Data	Keterangan
1.	Data Kependudukan	Bappeda dan kelurahan	Data Sekunder
2.	Monografi Desa Banyuurip	Kantor Desa	Data sekunder
3.	Monografi Kec. Ujungpangkah	Kantor Kecamatan	Data Sekunder
4.	Perda kawasan Pesisir No. 8 tahun 2011	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data sekunder
5.	Program Rehabilitasi Mangrove	Dinas kelautan dan Perikanan	Data Sekunder
6.	Pokmaswas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data sekunder
7.	Data CSR	Bappeda dan Dinas Kelautan dan Perikanan	Data sekunder
8.	Data Program Rehabilitasi Mangrove	BLH Kab. Gresik	Data Sekunder
9.	Peta Lokasi Desa banyuurip	Data Lapangan	Data Primer
10.	Quesioner 10 untuk Pemkab Gresik, 7 kecamatan Ujung pangkah, 3 Desa banyuurip dan 5 masyarakat	Data Lapangan	Data Primer
11.	Peta Desa banyuurip terkait luasan mangrove.	Data Lapangan	Data Primer
12.	Data Jenis Mangrove	Data Lapangan	Data Primer

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian kualitatif adalah suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan (Hadani Nawawi dan Mimi Martini, 1994).

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif. Analisis kualitatif tersebut dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk dapat menarik kesimpulan yang logis, sebelum disusun

dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan sejauh mana singkronisasi dan harmonisasi ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan wilayah pesisir secara nasional dengan kebijakan daerah.

Berdasarkan metode dan teknik pengumpulan data diatas, maka disusun kerangka pola piker penelitian studi dengan struktur sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4 berikut:

Tabel.4 Kerangka Pikir Penelitian

Latar Belakang	• Fungsi dan Peran hutan Mangrove di desa Banyuurip Tidak berfungsi optimal; • Kerusakan makin parah akibat ulah manusia sehingga proses sedimentasi dan erosi makin tinggi; • Koordinasi antara Pemkab Gresik dengan pemerintah dibawahnya (Kecamatan) tidak berjalan dengan baik
Rumusan Masalah	1. Untuk mengetahui pengelolaan konservasi mangrove yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dikawasan Desa Banyuurip, Kecamatan Ujung pangkah, Kabupaten Gresik; 2. Untuk mengetahui sinergitas pengelolaan rehabilitasi mangrove antara Pemerintah Kecamatan Ujung pangkah dengan Pemerintah Kabupaten Gresik di Desa Banyurip;
Tujuan Penelitian	1. Untuk mengetahui pengelolaan konservasi mangrove yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dikawasan Desa Banyuurip, Kecamatan Ujung pangkah, Kabupaten Gresik; 2. Untuk mengetahui sinergitas pengelolaan rehabilitasi mangrove antara Pemerintah Kecamatan Ujung pangkah dengan Pemerintah Kabupaten Gresik di Desa Banyurip;
Metode Penelitian	Menggunakan metode PRA (Participatory Rural Appraisal) dan RRA (Rapid Rural Apparaisal) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melakukan survey questioner; 2. Membuat pohon masalah; 3. Membuat table ranking masalah 4. Melakukan analisis SWOT
Hasil Akhir Penelitian	1. Mengetahui pengelolaan konservasi mangrove yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dikawasan Desa Banyuurip, Kecamatan Ujung pangkah, Kabupaten Gresik; 2. Mengetahui sinergitas pengelolaan rehabilitasi mangrove antara Pemerintah Kecamatan Ujung pangkah dengan Pemerintah Kabupaten Gresik di Desa Banyurip; 3. Strategi meningkatkan sinergitas antara pemerintah Kecamatan Ujung pangkah dengan Pemerintah Kabupaten Gresik.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Timur. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut. Lokasi penelitian Skripsi bertempat di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah, merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Gresik. Berikut ini batas-batas wilayah dari Desa Banyuurip antara lain:

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pangkahkulon
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sekapuk
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngemboh

Jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Ujungpangkah sesuai dengan Buku induk kode dan data pemerintahan dari kementerian dalam negeri tahun 2013 sebanyak 47.490 Jiwa dengan 13 desa yang ada. Perjalanan dari malang ke tempat penelitian yaitu di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah kurang lebih sekitar 4-5 jam ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor. Mata pencaharian dari penduduk yaitu bertani, berdagang, beternak, wiraswasta, nelayan dan sebagainya. Lokasi mangrove sebagai lokasi pengamatan sangat sulit dikarenakan melewati beberapa area budidaya tambak sehingga berbekal tenaga untuk berjalan melihat vegetasi yang ada.

4.1.1 Kondisi Umum Mangrove di Kabupaten Gresik

Kondisi pesisir pantai utara Kabupaten Gresik yang langsung berhadapan dengan Laut Jawa membuat wilayah tersebut cukup rentan terhadap abrasi akibat terjangan gelombang tinggi air laut. Kondisi Pesisir daratan pantai utara, mulai dari Kecamatan Panceng, Ujungpangkah, Bungah, dan Kecamatan Manyar, memiliki keadaan yang kurang baik setelah di sepanjang bibir pantai yang memanjang tersebut sebagian besar tampak gundul dan tidak terlihat tanaman bakau/mangrove yang berfungsi sebagai penahan dan pemecah gelombang alami. Di wilayah pesisir pantai utara Gresik, terdapat terjadinya kerusakan hutan mangrove mencapai 40% atau sekitar 271 ha dari 678,879 ha jumlah luas lahan mangrove di Gresik. Kerusakan mangrove di Pesisir Gresik terjadi di delapan kecamatan. Kerusakan terparah berada di daerah pesisir Kecamatan Ujungpangkah hanya tersisa seluas 250,1 ha. Kecamatan Ujungpangkah dilintasi oleh Sungai Bengawan Solo yang bermuara ke laut dan sangat potensial untuk usaha Perikanan. Kecamatan Ujungpangkah ini berada di wilayah pantai dan memiliki potensi sumberdaya alam yang tinggi yang meliputi mangrove dan terumbu karang. Kabupaten Gresik juga memiliki luas hutan bakau yang juga meliputi Kecamatan Manyar dan Sidayu mencapai 118,62 Ha sedangkan untuk Kecamatan Panceng dan Pulau Bawean memiliki luas 257,99 Ha (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik, 2014).

4.1.2 Kondisi Mangrove di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah

Menurut (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik, 2013) luas mangrove di wilayah Desa Banyuurip sendiri memiliki 84,1 ha, sedangkan menurut perhitungan secara langsung dengan pengamatan secara visualisasi dan di validasi menggunakan software *Landsat 8 OLI* luas mangrove Desa Banyuurip memiliki luas 71,16 ha. Berkurangnya mangrove di Desa Banyuurip tersebut diduga karena adanya abrasi yang terjadi pada lokasi penelitian, sehingga luas mangrove berkurang sebesar 13 ha. Berdasarkan klasifikasi mangrove yang diperoleh dari pengolahan citra didapatkan kelas mangrove jarang 38,62 ha, mangrove sedang 9.25 ha, mangrove rapat 23.29 ha. Sehingga mangrove yang dominan di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah adalah kategori mangrove jarang yaitu sebesar 38,62 ha.

Tabel 5. Kategori Mangrove di Desa Banyuurip

No	Kategori Mangrove	Luas Dalam (Ha)
1	Mangrove Jarang	38,62 ha
2	Mangrove Sedang	9.25 ha
3	Mangrove Rapat	23.29 ha

Di wilayah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah memiliki jenis mangrove *Avicennia Alba* (api-api), *Sonneratia Alba* (bedodo), *Rhizopora Mucronata* (tanjangan/bakau), *Rhizopora Apiculata, Bruguiera Gimnorrhiz*. Konversi atau alih fungsi kawasan hutan mangrove untuk kegiatan pertambakan (kerang hiaju) yang sangat luas di wilayah Desa Banyuurip dengan jumlah kerambah kerang hijau mencapai 100 kerambah yang dimiliki oleh 85 orang, sehingga kondisi hutan mangrove di Banyuurip cukup memprihatinkan karena di Desa Banyuurip mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan dan

pembudidaya kerang hijau. Terjadinya penambahan luas kawasan industri, perdagangan, dan permukiman dengan melakukan pengurangan untuk menambah luas areal dalam bentuk pembangunan "*Water Front City*" (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik, 2014). Tanpa disadari hal ini yang memperburuk kerusakan hutan mangrove dan memperparah kondisi perairan dan ekosistem pantai di desa Banyuurip, sehingga dikawatirkan dengan berkurangnya jumlah mangrove akan berdampak pada ekosistem yang ada. Hutan mangrove yang tersisa di Desa Banyuurip terletak berada di dekat TPI (Tempat Pelelangan Ikan), di daerah hutan mangrove tersebut juga di alih fungsikan menjadi tempat tambatan kapal atau perahu para nelayan.

4.1.3 Jenis Mangrove Di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah

Identifikasi jenis mangrove di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah menggunakan metode visual dimana metode ini dilakukan pengambilan sampel secara langsung di lapang dalam bentuk dokumentasi sehingga mendapatkan jenis-jenis tegakan mangrove yang berada di lokasi penelitian.

Tabel 6. Jenis Mangrove di Desa Banyuurip

No	Jenis Mangrove Di Lapang	Keterangan
1	***Rhizopora Mucronata*** 	Pohon dengan ketinggian mencapai 27 m, Pada umumnya tumbuh dalam kelompok, dekat atau pada pematang sungai pasang surut dan di muara sungai, jarang sekali tumbuh pada daerah yang jauh dari air pasang surut.
2	***Avicennia alba*** 	Merupakan jenis pionir pada habitat rawa mangrove di lokasi pantai yang terlindung, juga di bagian yang lebih asin di sepanjang pinggiran sungai yang dipengaruhi pasang surut, serta di sepanjang garis pantai. Buah berbentuk seperti kerucut/cabe/mente. Hijau muda kekuningan

3	***Rhizophora apiculata*** 	Memiliki perakaran yang khas hingga mencapai ketinggian 5 meter, dan kadang-kadang memiliki akar udara yang keluar dari cabang. Tumbuh pada tanah berlumpur, halus, dalam dan tergenang pada saat pasang normal. Tidak menyukai substrat yang lebih keras yang bercampur dengan pasir.
4	***Bruguiera gimnorrhiza*** 	Merupakan jenis yang dominan pada hutan mangrove yang tinggi dan merupakan ciri dari perkembangan tahap akhir dari hutan pantai, serta tahap awal dalam transisi menjadi tipe vegetasi daratan. Tumbuh di areal dengan salinitas rendah dan kering.
5	***Sonneratia alba*** 	Jenis pionir, tidak toleran terhadap air tawar dalam periode yang lama. Menyukai tanah yang bercampur lumpur dan pasir, kadang-kadang pada batuan dan karang. Sering ditemukan di lokasi pesisir yang terlindung dari hempasan gelombang, juga di muara dan sekitar pulau-pulau lepas pantai.

4.2 Pendapat Masyarakat Kecamatan Ujungpangkah Mengenai Kondisi dan Peran Pemerintah Menangani Kerusakan Hutan Mangrove

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Desa Ujungpangkah, didapatkan hasil penelitian sebagai berikut :

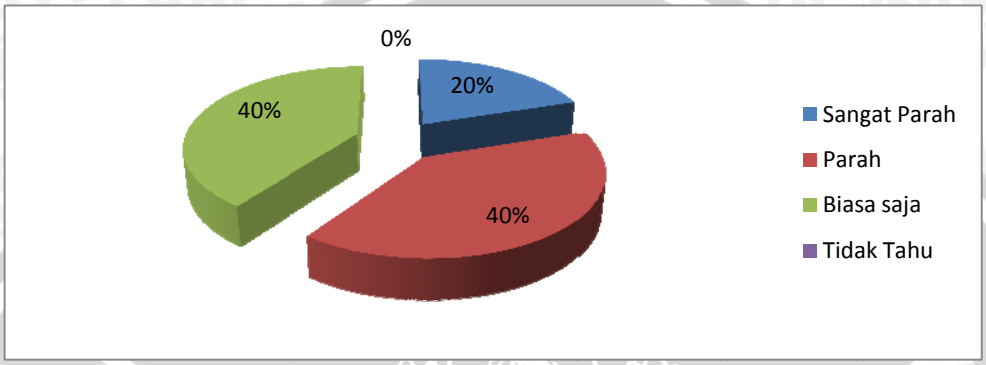

Gambar 2. Pandangan masyarakat terhadap kerusakan mangrove

Pada Gambar 2 tentang pandangan masyarakat terhadap kerusakan mangrove di Kecamatan Ujungpangkah, sebanyak 20% orang berpendapat sangat parah, sebanyak 40% orang berpendapat parah, dan sebanyak 40% orang berpendapat biasa saja. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat di Desa Banyuurip kurang mengetahui pentingnya ekosistem mangrove di daerahnya, sehingga mereka berpendapat sesuai apa yang mereka ketahui.

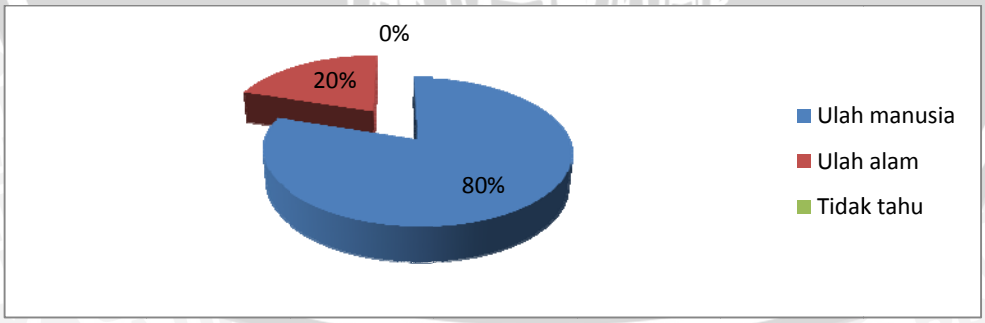

Gambar 3. Penyebab kerusakan Mangrove

Pada Gambar 3 tentang penyebab terjadinya kerusakan hutan mangrove, sebanyak 80% orang berpendapat ulah manusia, dan sebanyak 20% orang berpendapat ulah alam. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat di

daerah pesisir Desa Banyuurip memiliki pendapatan yang kurang, sehingga mereka menebang pohon mangrove digunakan sebagai kayu bakar untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.

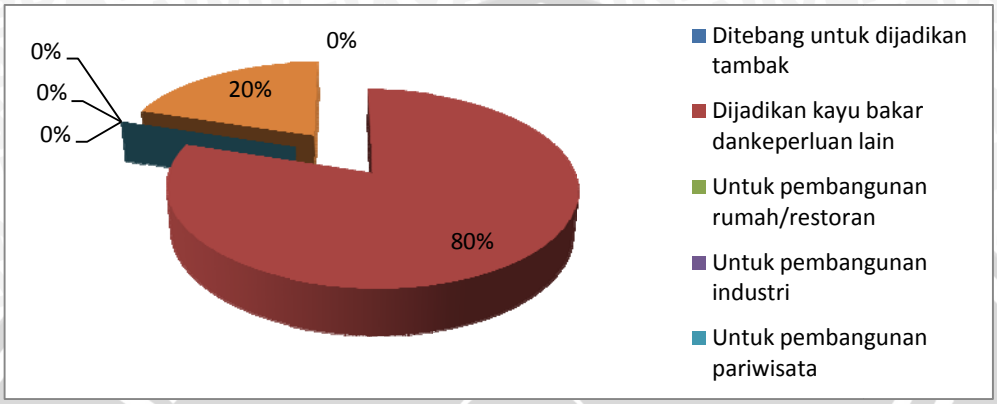

Gambar 4. Jenis Kerusakan Mangrove karena ulah manusia

Pada Gambar 4 tentang jenis kerusakan akibat ulah manusia, sebanyak 80% orang berpendapat ditebang kayunya untuk diambil kayu bakar, ditebang untuk keperluan lain (seperti untuk bangunan, pembuatan jalan, dll), dan sebanyak 20% orang berpendapat tidak tahu.

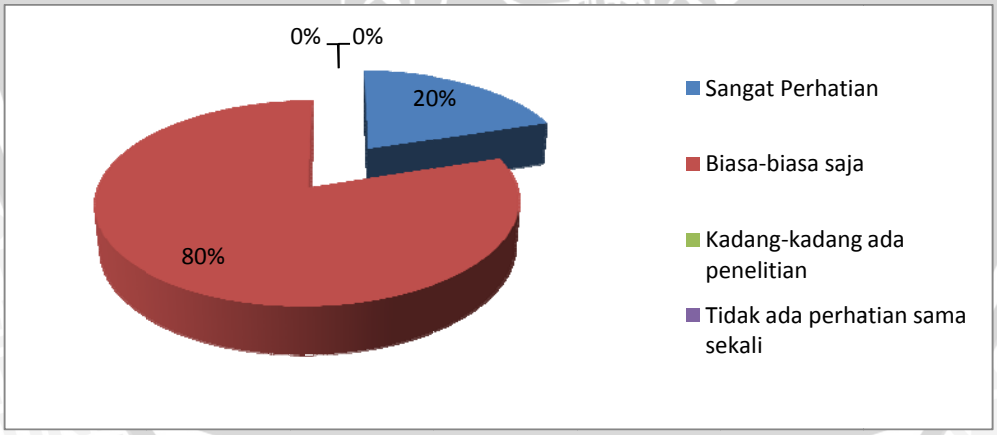

Gambar 5. Peran Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah

Pada Gambar 5 tentang Peran pemerintah Kecamatan Ujungpangkah dalam mengatasi kerusakan hutan mangrove, sebanyak 20% orang berpendapat sangat perhatian, dan sebanyak 80% orang berpendapat biasa-biasa saja. Hal

ini dikarenakan pemerintah Kecamatan Ujungpangkah memiliki peran sebagai pengkoordinasi permasalahan yang terdapat dari desa untuk disampaikan langsung kepada pemerintah Kabupaten Gresik dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan.

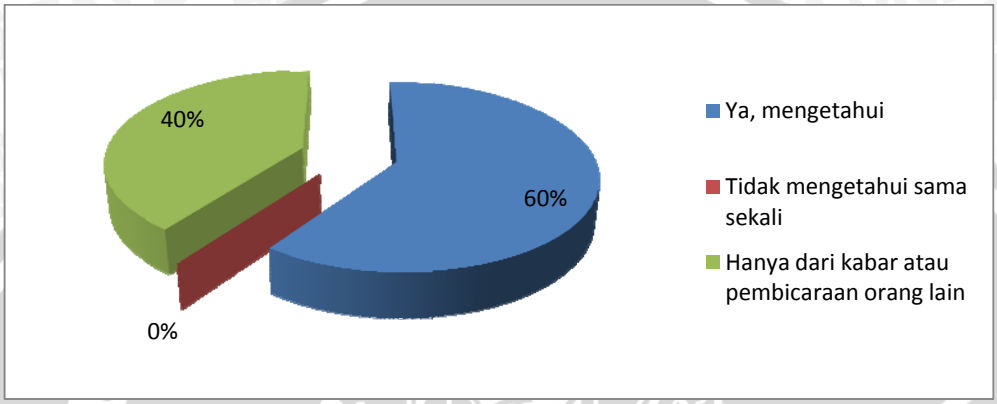

Gambar 6. Pengetahuan masyarakat tentang program penanggulangan kerusakan hutan mangrove

Pada Gambar 7 tentang Pengetahuan masyarakat tentang program penanggulangan kerusakan hutan mangrove, sebanyak 60% orang berpendapat ya, mengetahui, sebanyak 40% orang berpendapat hanya dari kabar atau pembicaraan orang lain.

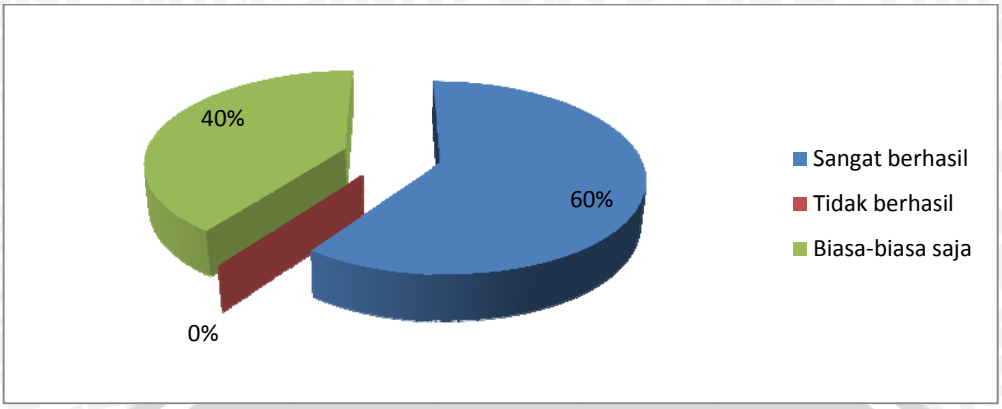

Gambar 7. Pengetahuan masyarakat tentang program penanggulangan kerusakan hutan mangrove

Pada Gambar 8 tentang Pengetahuan masyarakat tentang program penanggulangan kerusakan hutan mangrove, sebanyak 60% orang berpendapat ya, mengetahui, sebanyak 40% orang berpendapat hanya dari kabar atau pembicaraan orang lain.

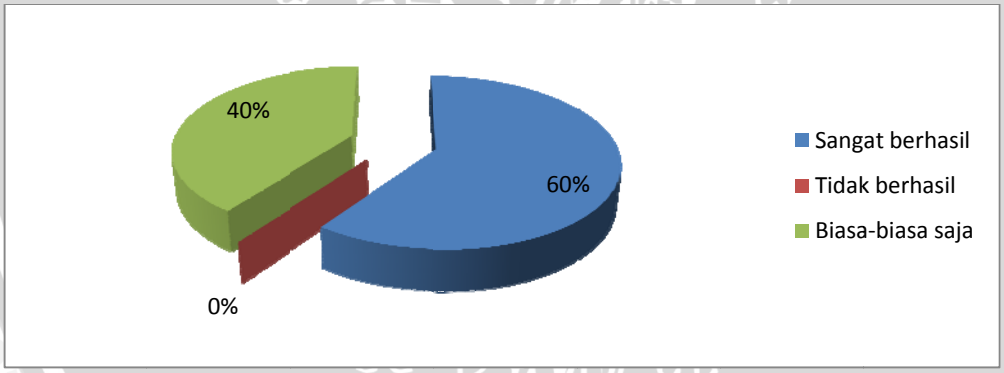

Gambar 8. Penanggulangan kerusakan hutan mangrove

Pada Gambar 9 tentang Program penanggulangan kerusakan hutan mangrove yang dilaksanakan saat ini, sebanyak 60% orang berpendapat sangat berhasil, dan sebanyak 40% orang berpendapat biasa-biasa saja. Hal ini didasarkan pada program rehabilitasi mangrove di Desa Banyuurip yang di koordinasi oleh Kecamatan Ujungpangkah dan juga masyarakat yang ikut serta dalam penanaman mangrove.

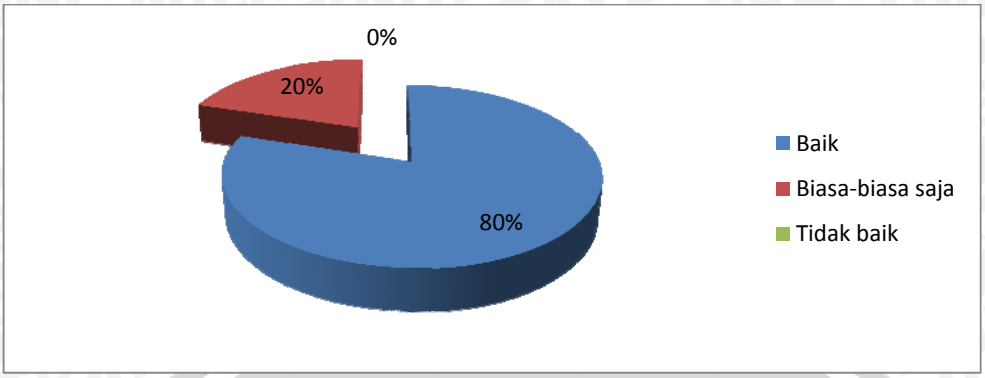

Gambar 9. Program Penanggulangan Kerusakan Mangrove oleh Pemerintah Kabupaten Gresik

Pada item Kualitas program penanggulangan kerusakan hutan mangrove yang berasal dari Pemkab Gresik, sebanyak 80% orang berpendapat baik, dan sebanyak 20% orang berpendapat biasa-biasa saja. Hal ini dikarenakan adanya program rehabilitasi yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik setiap tahunnya.

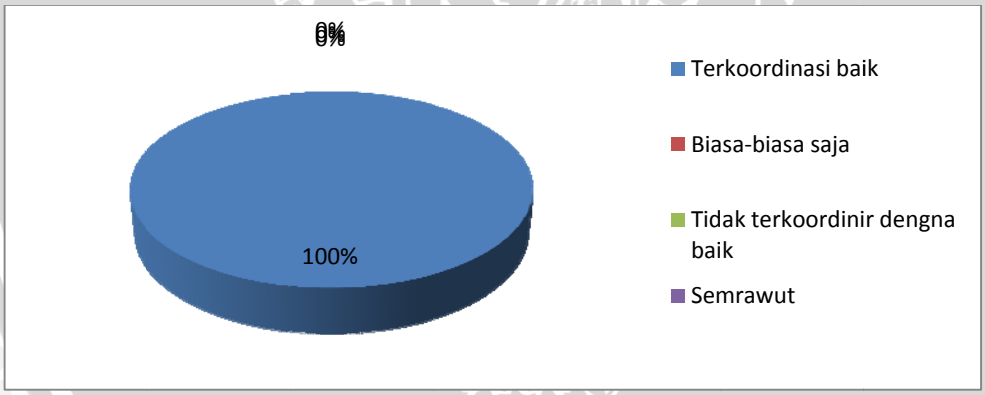

Gambar 10. Koordinasi Pemkab Gresik dan Kecamatan Ujung Pangkah

Pada item Koordinasi antara Pemkab Gresik dengan Kecamatan Ujungpangkah, semua orang berpendapat terkoordinasi baik. Karena setiap adanya permasalahan yang terjadi di desa, pemerintah Kecamatan Ujungpangkah menanggapi dan berkoordinasi secara langsung kepada instansi yang terkait.

4.3 Peran Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah Menangani Kerusakan Hutan Mangrove

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan pada pemerintah Kecamatan Ujungpangkah, didapatkan hasil penelitian sebagai berikut :

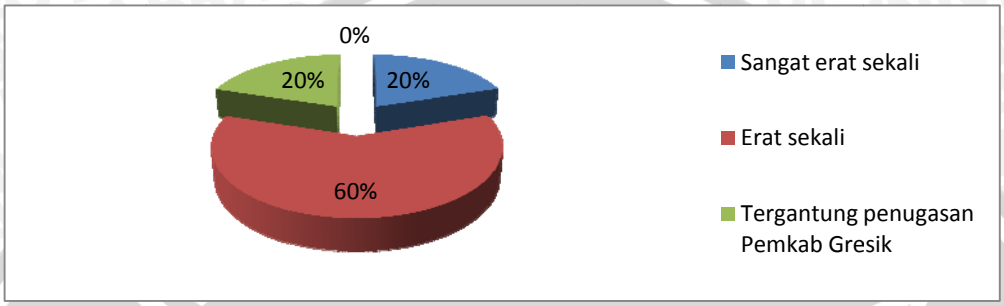

Gambar 11. Tupoksi Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah menangani Persoalan Hutan Mangrove

Pada item Tugas dan pokok pemerintah Kecamatan Ujungpangkah menangani persoalan hutan manrove di Kabupaten Gresik, sebanyak 20% orang berpendapat sangat erat sekali, sebanyak 60% orang berpendapat erat sekali, dan sebanyak 20% orang berpendapat tergantung penugasan Pemerintah Kabupaten Gresik. Hal ini di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan bahwa Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

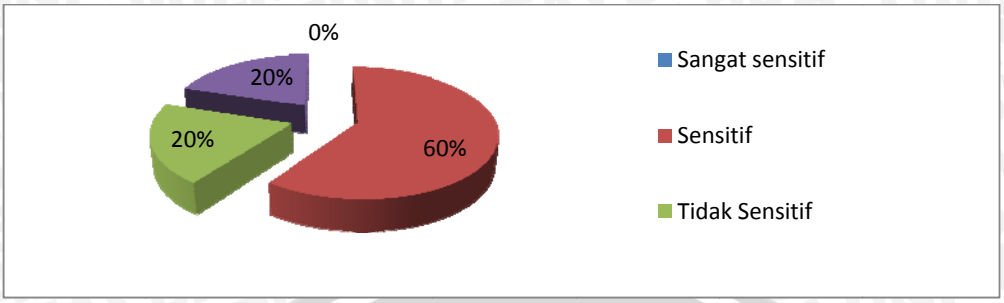

Gambar 12. Sensitifitas Pemerintah Kecamatan Ujung pangkah menangani kerusakan hutan Mangrove

Pada item Sensitivitas pemerintah Kecamatan Ujungpangkah dalam menangani kerusakan mangrove, sebanyak 3 (60%) orang berpendapat sensitif, sebanyak 1 (20%) orang berpendapat tidak sensitif, sebanyak 1 (20%) orang berpendapat tergantung instruksi Pemerintah Kabupaten Gresik.

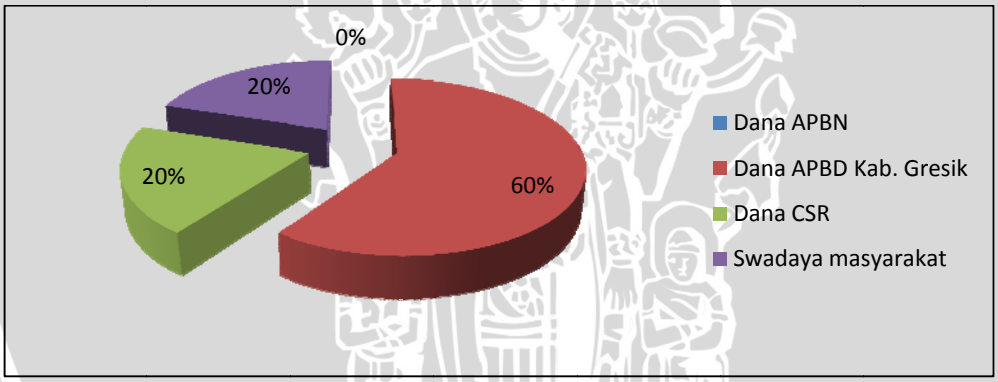

Gambar 13. Sumber pembiayaan Mengatasi Kerusakan Mangrove

Pada item Sumber pembiayaan kerusakan mangrove, sebanyak 60% orang berpendapat dana APBD kab. Gresik, sebanyak 20% orang berpendapat dana CSR, sebanyak 20% orang berpendapat swadaya masyarakat.

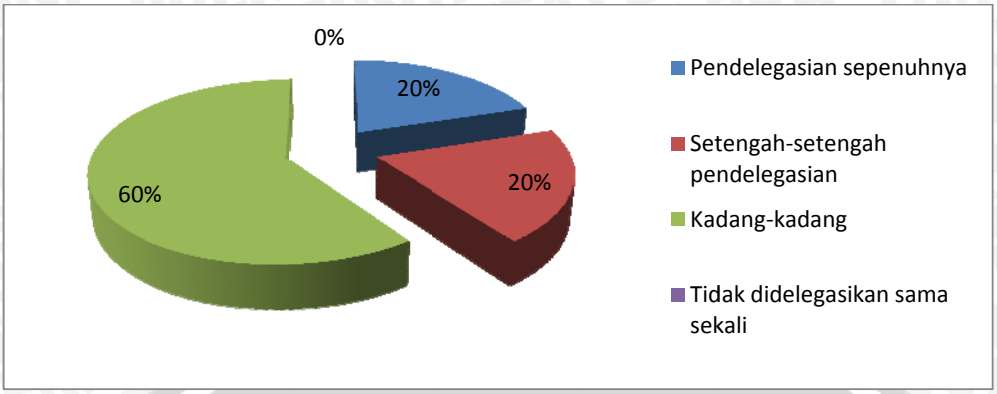

Gambar 14. Pendelegasian dari Pemkab Gresik ke Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah

Pada item Pemkab Gresik mendelegasikan sepenuhnya penanganan kerusakan mangrove kepada pemerintah Kecamatan Ujungpangkah, sebanyak 20% orang berpendapat pendelegasian sepenuhnya, sebanyak 20% orang berpendapat setengah-setengah pendelegasian, dan sebanyak 60% orang berpendapat kadang-kadang didelegasikan dan kadang-kadang tidak didelegasikan.

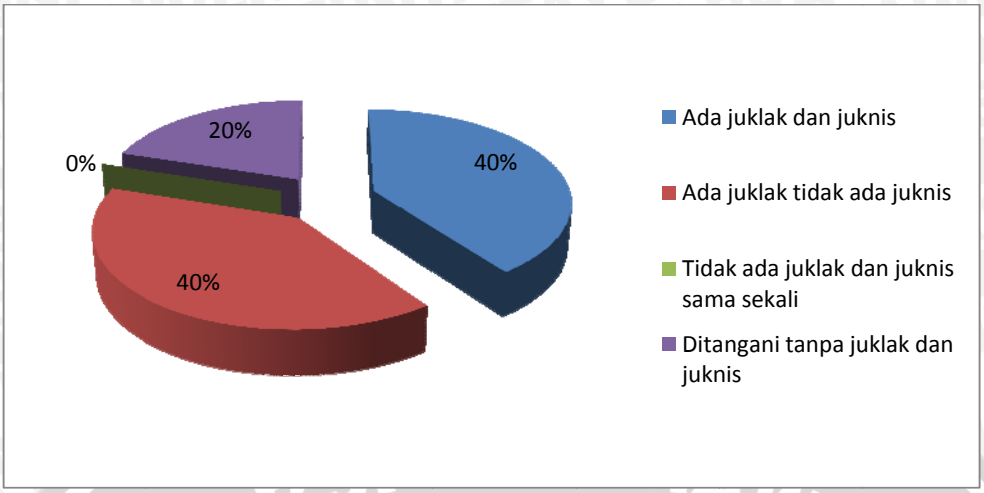

Gambar 15. Keberadaan Juklak dan Juknis Mengatasi Kerusakan Mangrove

Pada item Diberikannya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), sebanyak 40% orang berpendapat ada juklak dan juknis, sebanyak 40% orang berpendapat ada juklak tidak ada juknis, dan sebanyak 20% orang berpendapat ditangani tanpa juklak dan juknis.

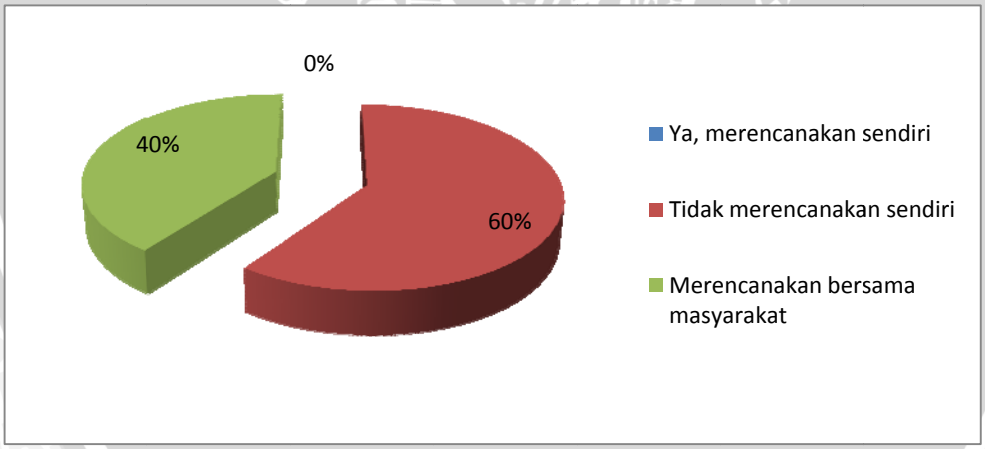

Gambar 16. Perencanaan Program Kerusakan Mangrove oleh Pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah

Pada item Perencanaan program kerusakan mangrove oleh pemerintah Kecamatan Ujungpangkah, sebanyak 60% orang berpendapat tidak merencanakan sendiri, sebanyak 40% orang berpendapat merencanakan bersama masyarakat.

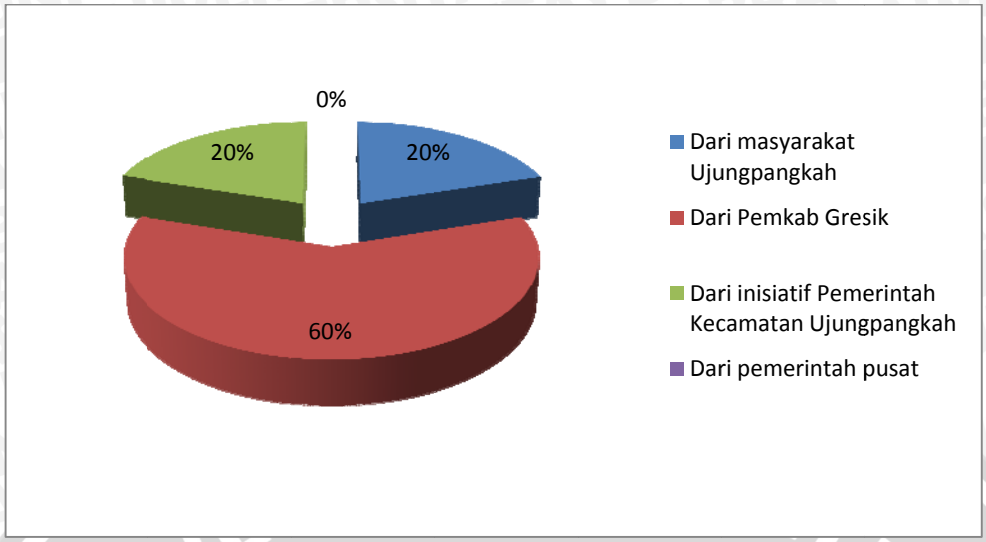

Gambar 17. Asal Usul Program Penanggulangan Kerusakan Mangrove

Pada item Asal program penanggulangan kerusakan mangrove, sebanyak 20% orang berpendapat dari masyarakat Ujungpangkah, dan sebanyak 60% orang berpendapat dari Pemkab Gresik.

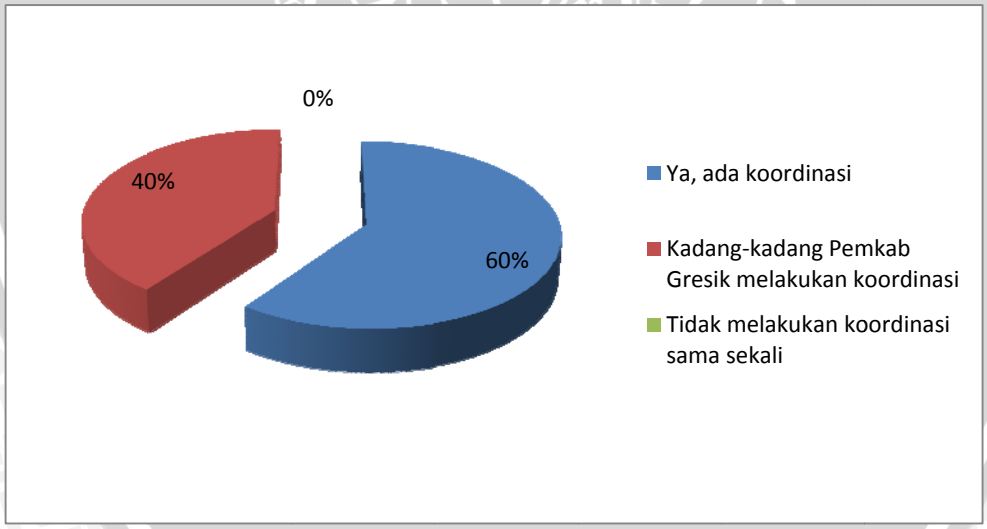

Gambar 18. Koordinasi Program Penanggulangan Kerusakan Mangrove

Pada item Koordinasi program penanggulangan kerusakan mangrove dari Pemkab Gresik, sebanyak 60% orang berpendapat ada koordinasi, dan sebanyak 40% orang berpendapat kadang-kadang Pemkab Gresik melakukan koordinasi.

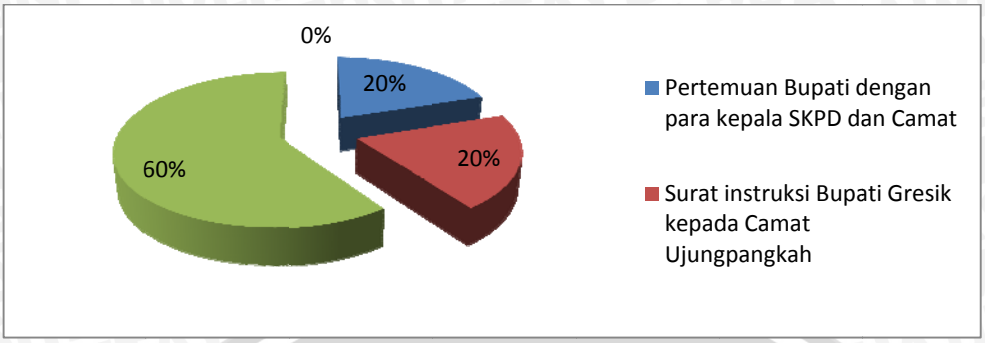

Gambar 19. Bentuk Koordinasi Program Penanggulangan Kerusakan Mangrove

Pada item Bentuk koordinasi program penanggulangan kerusakan mangrove yang dialokasikan dari Pemkab Gresik kepada pemerintah Kecamatan Ujungpangkah, sebanyak 20% orang berpendapat melalui pertemuan bupati dengan para kepala skpd dan camat, sebanyak 20% orang berpendapat melalui surat instruksi dari bupati Gresik kepada camat Ujungpangkah, dan sebanyak 60% orang berpendapat melalui pertemuan staf terkait Pemkab Gresik dengan camat dan para staf camat Ujungpangkah.

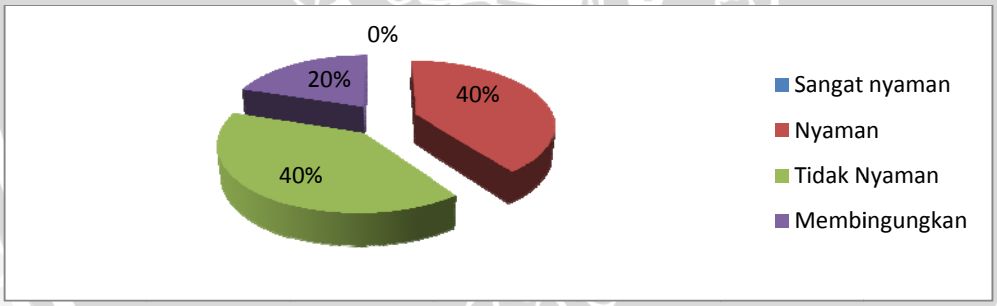

Gambar 20. Kenyamanan Pemerintah Kecamatan Terhadap Program Penanggulangan Kerusakan Mangrove

Pada item Kenyamanan dari camat atau perangkat camat terhadap program penanggulangan kerusakan mangrove, sebanyak 40% orang berpendapat nyaman, sebanyak 40% orang berpendapat tidak nyaman, dan sebanyak 20% orang berpendapat membingungkan.

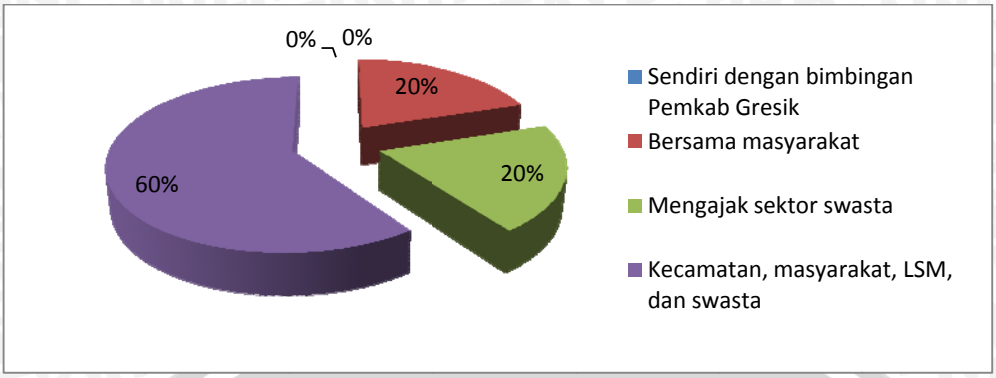

Gambar 21. Bentuk Kerjasama Perencanaan Program Penanggulangan Mangrove

Pada item Kegiatan perencanaan penanganan kerusakan mangrove yang dilakukan pemerintah Kecamatan Ujungpangkah, sebanyak 20% orang berpendapat dilakukan bersama masyarakat, sebanyak 20% orang berpendapat mengajak sektor swasta untuk menanggulangi kerusakan mangrove, dan sebanyak 60% orang berpendapat dilakukan secara bersama antara pemerintah Kecamatan Ujungpangkah, masyarakat sekitar mangrove, LSM, dan sektor swasta.

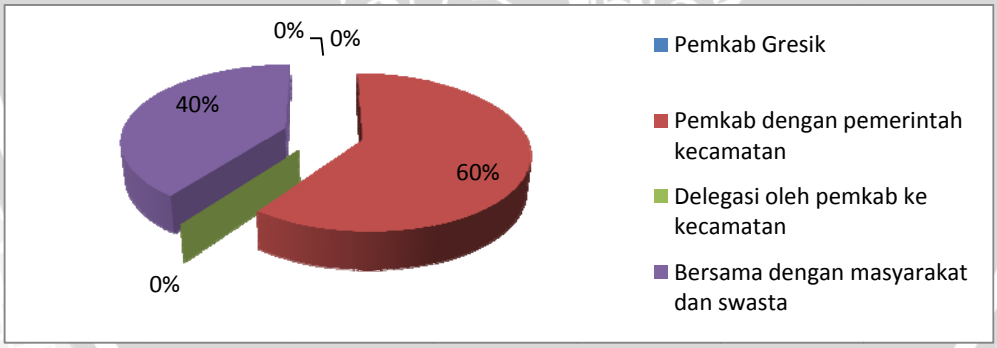

Gambar 22. Pelaksanaan Program Penanganan Kerusakan Mangrove

Pada item Pelaksanaan program penanganan kerusakan mangrove, sebanyak 60% orang berpendapat dilakukan bersama antara Pemkab Gresik dengan pemerintah Kecamatan Ujungpangkah, dan sebanyak 40% orang berpendapat dilakukan bersama dengan masyarakat dan swasta.

4.4 Peran Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Penanganan Kerusakan Hutan Mangrove di Kecamatan Ujung Pangkah

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan pada pemerintah Kabupaten Gresik, didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

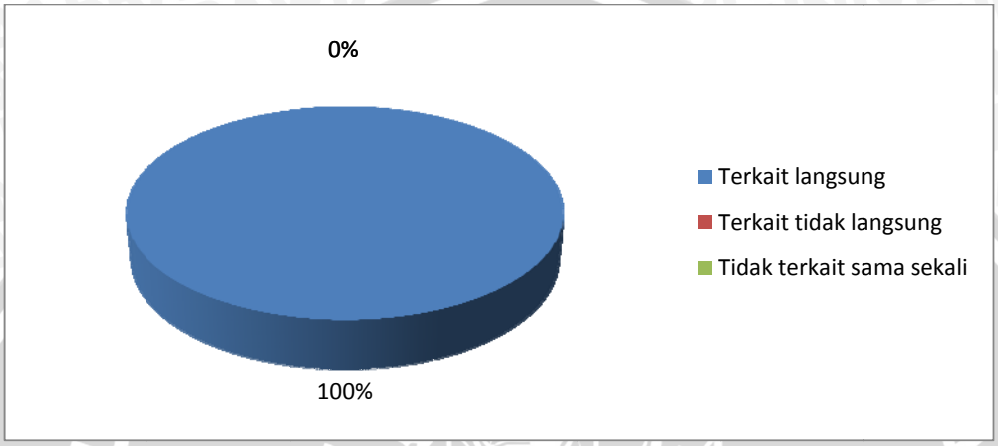

Gambar 23. Tupoksi Pemerintah Menangani Kerusakan Hutan Mangrove

Pada Gambar 24 tentang Tugas dan pokok instansi menangani persoalan hutan mangrove di Kabupaten Gresik, semua orang berpendapat terkait langsung.

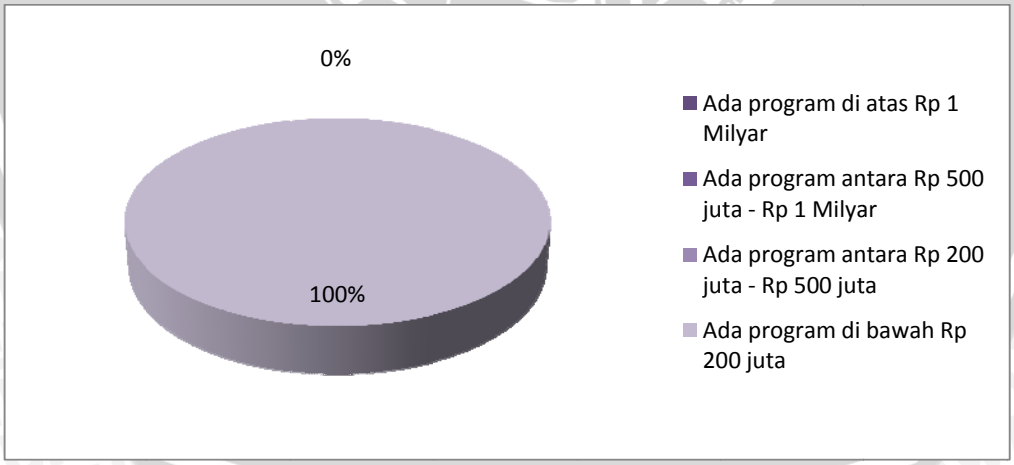

Gambar 24. Biaya Program Menangani Hutan Mangrove

Pada item Adanya program untuk menangani hutan mangrove, semua orang berpendapat ada program di bawah Rp 200 juta.

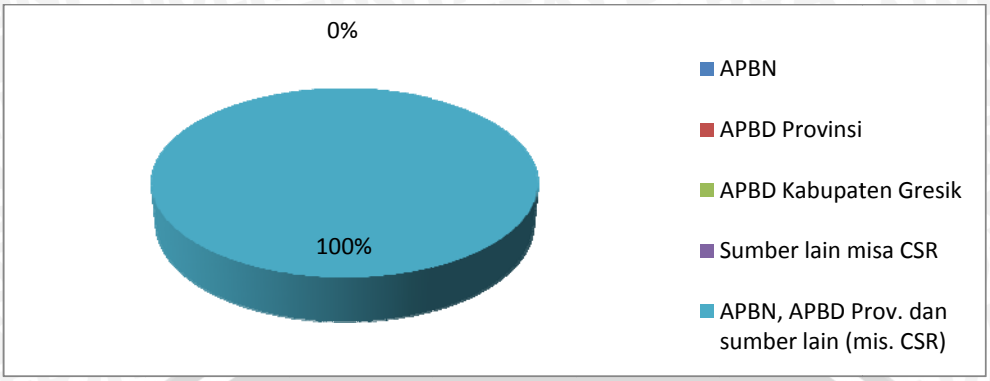

Gambar 25. Sumber dana Penanganan Kerusakan Hutan Mangrove

Pada item Sumber dana dari kegiatan program mangrove, semua orang berpendapat APBN, APBD provinsi, dan sumber lain misal CSR.

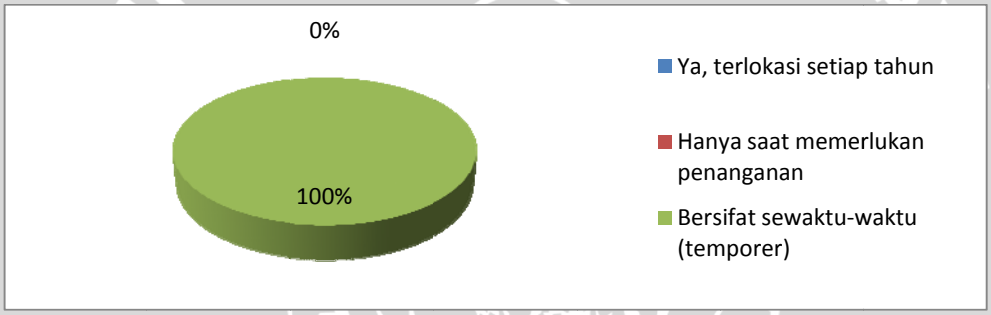

Gambar 26. Ketersediaan Dana Penanganan Kerusakan mangrove

Pada item Dana mangrove terpogram dan teralokasi setiap tahun, semua orang berpendapat bersifat sewaktu-waktu (temporer).

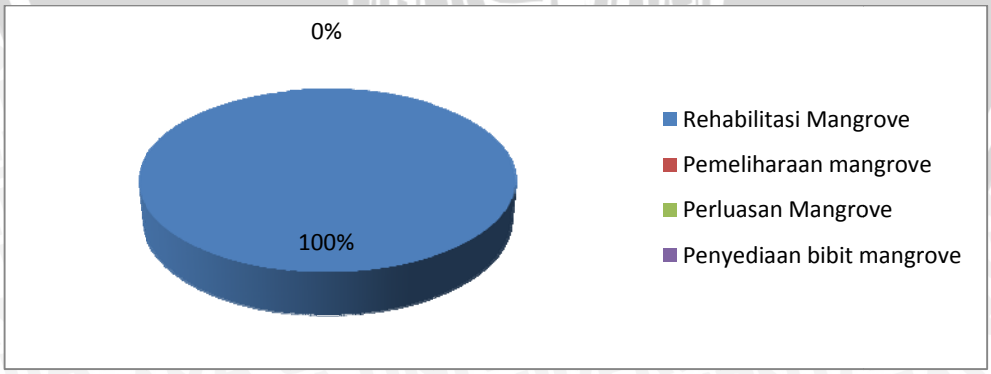

Gambar 27. Bentuk Program Penanganan Kerusakan Hutan Mangrove

Pada item Bentuk program hutan mangrove, semua orang berpendapat rehabilitasi mangrove.

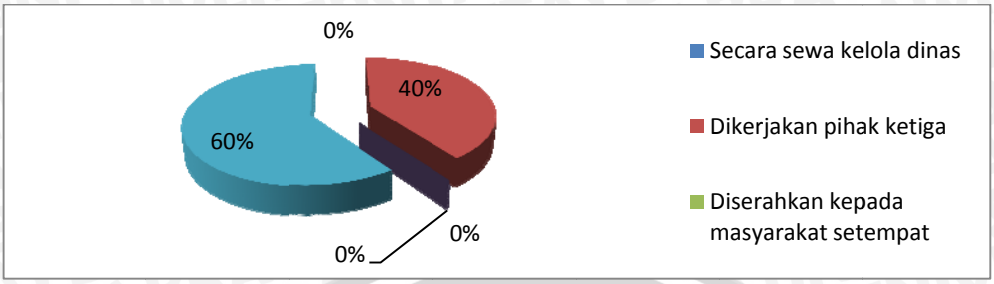

Gambar 28. Tata Cara Pengerjaan Penanganan Kerusakan Hutan mangrove

Pada item Pengerjaan program hutan mangrove, sebanyak 40% orang berpendapat dikerjakan pihak ketiga, dan sebanyak 60% orang berpendapat diserahkan kepada swasta dan masyarakat setempat.

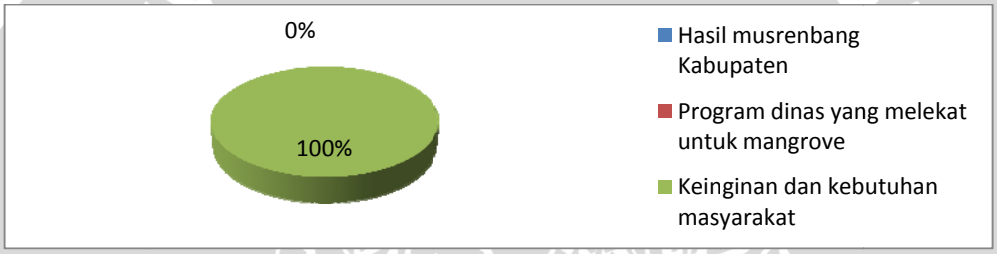

Gambar 29. Akomodasi Substansi Proses Perencanaan Penanganan Kerusakan Mangrove

Pada item Proses perencanaan mengelola mangrove di Kabupaten Gresik, semua orang berpendapat keinginan dan kebutuhan masyarakat.

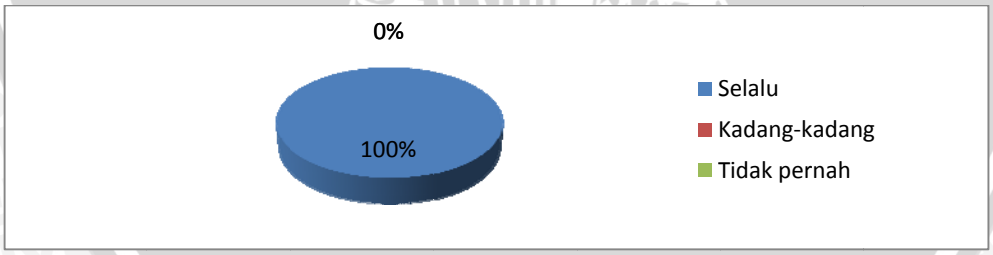

Gambar 30. Koordinasi Perencanaan Antara Pemkab Gresik dan Pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah

Pada item Hubungan perencanaan program mangrove antara Dinas di Pemkab Gresik dengan pemerintah kecamatan, semua orang berpendapat selalu berkoordinasi perencanaan antara Pemkab Gresik dengan pemerintah kecamatan.

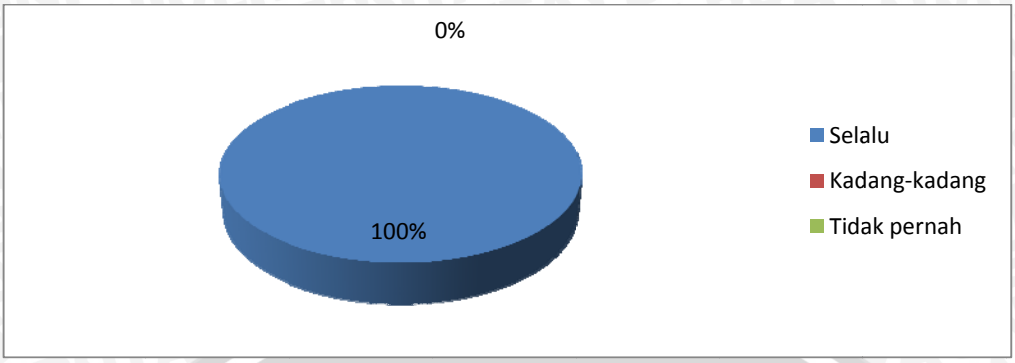

Gambar 31. Koordinasi Pelaksanaan Program

Pada item Hubungan pelaksanaan program mangrove antara Dinas di Pemkab Gresik dengan pemerintah kecamatan, semua orang berpendapat selalu berkoordinasi pelaksanaan antara Pemkab Gresik dengan pemerintah kecamatan.

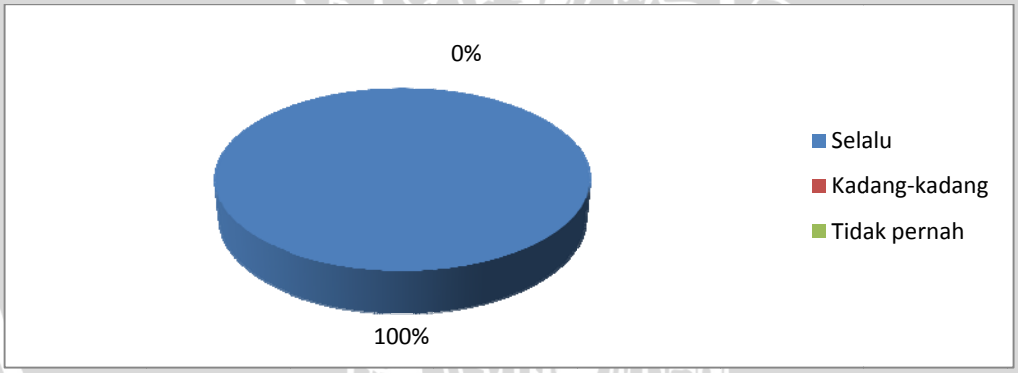

Gambar 32. Koordinasi Monitoring Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pada item Hubungan monitoring program mangrove antara Dinas di Pemkab Gresik dengan pemerintah kecamatan, semua orang berpendapat selalu berkoordinasi monitoring antara Pemkab Gresik dengan pemerintah kecamatan.

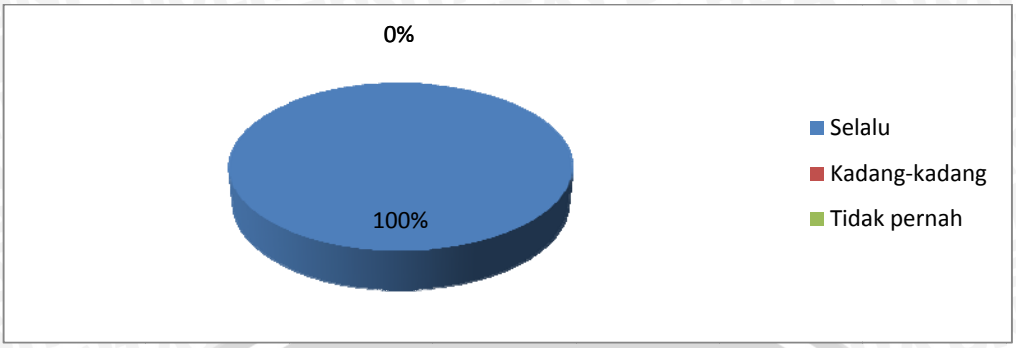

Gambar 33. Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program

Pada item Hubungan evaluasi program mangrove antara Dinas di Pemkab Gresik dengan pemerintah kecamatan, semua orang berpendapat selalu berkoordinasi evaluasi antara Pemkab Gresik dengan pemerintah kecamatan.

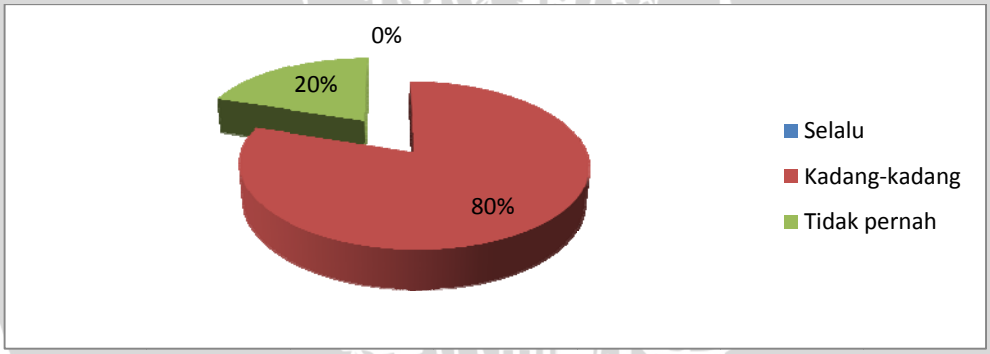

Gambar 34. Pendelegasian Penanganan Mangrove

Pada item Pendelegasian kepada pemerintah kecamatan dari Pemkab Gresik, sebanyak 80% orang berpendapat kadang-kadang pendelegasian penanganan kepada pemerintah kecamatan, sebanyak 20% orang berpendapat tidak sepenuhnya pendelegasian penanganan kepada pemerintah kecamatan.

4.5 Evaluasi Hasil Penelitian

4.5.1 Peran POKWASMAS di Kecamatan Ujungpangkah

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Gresik melalui Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menyampaikan bahwa bahwa Surat Keputusan Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwasmas) telah ada sejak 2008. Surat Keputusan Bupati Nomor 313/KPTS/XII/2008 tentang kelompok masyarakat pengawas sudah keluar. Namun terkait Surat Keputusan tersebut, DKP tetap melakukan evaluasi terhadap anggota Pokwasmas yang kurang aktif dan akan dilakukan pergantian.

Sementara Surat Keputusan yang di berikan kepada Pokwasmas di Kecamatan Ujungpangkah, juga sudah ada yakni SK Bupati Gresik No. KPTS.173/KPTS/V/2011. Keputusan Bupati yang terbaru tersebut yaitu mengenai pembentukan Pokwasmas di Kecamatan Ujungpangkah yakni Desa Banyuurip khususnya di Dusun Banyu Legi, Dusun Bangsal, dan Dusun Bundot. Setelah di keluarkannya Surat Keputusan Bupati tersebut maka terbentuklah POKWASMAS di Desa Banyuurip dan Pembentukan Kelompok Rukun Nelayan yang diberi nama Tirta Buana.

Pokwasmas belum melibatkan kepolisian yakni Polair dan Angkatan Laut karena sesuai UU No. 45 tahun 2009 pasal 66 tentang pengawasan perikanan dan Konservasi poin 3 menyebutkan bahwa pengawasan perikanan terdiri atas penyidik pegawai negeri perikanan dan non penyidik pegawai negeri sipil perikanan. Namun, Pokwasmas melibatkan serta organisasi yang berlokasi di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) untuk turut serta dalam pengawasan dan pengelolaan yang ada di Desa Banyuurip secara keseluruhan.

4.5.2 Masyarakat Kecamatan Ujungpangkah

Pandangan Masyarakat Kecamatan Ujungpangkah Mengenai kondisi mangrove berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa kerusakan mangrove didaerah peneltian terkategori cukup parah. Menurut Dahuri (2008), degradasi kualitas lingkungan yang sering terjadi pada kawasan pesisir adalah penurunan areal mangrove. Dimana menyempitnya areal tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal, baik akibat dari kegiatan manusia maupun alam. Akan tetapi yang terjadi di wilayah pesisir Indonesia saat ini adalah penurunan areal mangrove akibat dari kegiatan manusia terutama dalam bidang ekonomi.

Adapun kerusakan mangrove di Pesisir Gresik terjadi di delapan kecamatan. Kerusakan terparah berada di sekitar pesisir Kecamatan Ujungpangkah dan Manyar. Luas hutan mangrove di Kecamatan Ujungpangkah hanya tersisa seluas 84,1 ha. Kerusakan ekosistem mangrove di Kecamatan Ujungpangkah juga menimbulkan beberapa permasalahan lingkungan. Di Kecamatan Ujungpangkah terletak muara Sungai Bengawan Solo. Pada wilayah tersebut merupakan kawasan ekosistem mangrove yang kaya akan berbagai biota pesisir. Akan tetapi saat ini kondisi ekosistem mangrove pada kawasan tersebut juga mengalami kerusakan. Terjadinya degradasi fisik habitat kawasan pesisir Ujungpangkah mengakibatkan penurunan kualitas ekosistem pesisir. Kebanyakan habitat yang mengalami kerusakan di kawasan pesisir desebabkan oleh aktivitas manusia, seperti konversi hutan mangrove, pengembangan pemukiman, pembangunan infrastruktur, penebangan dan sebagainya. Selain degradasi fisik habitat, di beberapa wilayah pesisir Ujungpangkah juga mengalami abrasi, seperti abrasi yang terjadi di kawasan pesisir Desa Ngemboh dan Desa Banyuurip (Profil Sumber Daya Wilayah Pesisir Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, 2010).

Gambaran diatas diperkuat oleh penelitian lapangan yang menunjukkan bahwa 80 % kerusakan hutan mangrove disebabkan karena ulah manusia yang terdapat pada Gambar 4, khususnya mangrove dipergunakan untuk kayu bakar oleh masyarakat sekitar pesisir. Untuk mengatasi kerusakan hutan mangrove tersebut, maka pemerintah kecamatan Ujungpangkah berperan mengembalikan keberadaan hutan mangrove. Peran tersebut berdasarkan penelitian lapangan 80 % dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Ujungpangkah yang terdapat pada Gambar 5. Hal ini sangat mengejutkan bahwa pemerintah kecamatan Ujung Pangkah berperan besar menyumbang kepada kerusakan hutan mangrove. Gejala ini menunjukkan bahwa pemberian ijin untuk melakukan alih fungsi mangrove untuk kegiatan ekonomi diberikan oleh pemerintah kecamatan Ujung Pangkah. Disamping itu pengambilan pohon mangrove untuk kayu bakar oleh masyarakat disebabkan karena lemahnya pengawasan.

Pengetahuan masyarakat tentang program penanggulangan kerusakan hutan mangrove telah diketahui oleh masyarakat yang dijelaskan pada Gambar 7, walaupun baru mencapai 60 %. Angka ini masih menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat belum merata. Disamping itu masyarakat pun menilai sebanyak 60 % yang dapat dilihat pada Gambar 10 bahwa kerusakan hutan berhasil ditangani kerusakannya oleh pemerintah. Fenomena ini menunjukkan bahwa “pembiaran” kerusakan oleh pemerintah kecamatan Ujung Pangkah dengan memberikan ijin untuk menanamkan investasinya di Kecamatan Ujung Pangkah merupakan bentuk pemerintah kecamatan mendorong investasi diwilayahnya. Namun demikian, dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan yang ditimbulkan berupa dampak lingkungan, dengan konsistennya diperbaiki sendiri oleh pemerintah kecamatan Ujungpangkah. Dengan demikian didalam penelitian menunjukkan hasil penelitian lapangan bahwa keberhasilan pemerintah

Kecamatan Ujungpangkah tidak lepas dari bantuan pemerintah Kabupaten Gresik. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang terjalin antara kecamatan Ujung Pangkah dengan pemerintah kabupaten Gresik berjalan dengan baik.

4.5.3 Peran Pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah Menangani kerusakan Hutan Mangrove.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tugas pokok instansi pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah yang menangani persoalan kerusakan hutan mangrove dan pada Gambar 12 dijelaskan bahwa 60 % responden menunjukkan bahwa tugas pokok instansi ini erat sekali dengan pemerintahan kecamatan Ujung pangkah. Dengan demikian sensitivitas pemerintah Kecamatan Ujung pangkah menangani kerusakan hutan mangrove dinyatakan 60 % sensitive dan 20 % tergantung dari pemerintah Kabupaten Gresik yang terdapat pada Gambar 13. Untuk itu sumber pembiayaan pemerintah kecamatan Ujung pangkah untuk mengatasi kerusakan hutan mangrove yang dijelaskan pada Gambar 14 tentang sumber pembiayaan beberapa responden yaitu sebesar 60 % menyatakan berasal dari APBD Kabupaten Gresik, responden sebesar 20 % menyatakan berasal dari CSR dan responden menyatakan 20 % berasal dari swadaya masyarakat.

Namun, hasil penelitian menunjukkan hasil yang mengejutkan yang terdapat pada Gambar 15 bahwa ternyata responden sebanyak 60 % menyatakan bahwa pendelegasian dari Pemerintah Kabupaten Gresik tergambar pendelegasian yang setengah-setengah. Artinya Pemerintah kabupaten Gresik belum sepenuhnya memberikan pendelegasian penuh kepada pemerintah kecamatan Ujung pangkah.

Pada kenyataannya pemerintah Kecamatan masih tergantung kepada Pemerintah Kabupaten dalam membangun daerahnya. Hal ini disebabkan

karena perbedaan potensi, permasalahan dan kemampuan masing – masing Kecamatan. Pembangunan yang masih membutuhkan peran Pemerintah Kabupaten biasanya lebih banyak bersifat fisik sarana prasarana karena membutuhkan dana yang besar. Di sinilah Pemerintah Kabupaten Gresik mempunyai peran dalam misi pemerataan pembangunan.

Keberadaan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai pedoman untuk mengatasi kerusakan mengrove disikapi oleh responden dengan beragam jawaban yang membingungkan. Dalam Gambar 16 menjelaskan bahwa disatu pihak 40 % responden menyatakan ada juklak dan juknisnya, tetapi 40 % lainnya mengatakan ada juklak tetapi tidak ada juknisnya. Hal ini mensyaratkan bahwa ada beberapa aparatur pemerintah kecamatan yang mengakui ada juklak dan juknis, tetapi ada juga yang mengakui hanya ada sebahagian saja. Hal ini berakibat kepada proses perencanaan program oleh pemerintah kecamatan Ujungpangkah yang terdapat pada Gambar 17 bahwa 60 % responden yang menyatakan pemerintah Ujungpangkah tidak merencanakan sendiri program penanggulangan kerusakan mangrove, sedang responden sisanya sebanyak 40 % program penanggulangan kerusakan mangrove dikerjakan bersama masyarakat.

Responden yang menyatakan bahwa program penanggulangan mangrove yang dilakukan pemerintah kecamatan Ujung Pangkah tidak direncanakan sendiri, memang ada betulnya, karena asal usul program berasal dari pemerintah kabupaten Gresik. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Gresik setiap tahunnya menganggarkan pada APBD Kab. Gresik. Untuk melaksanakan APBD yang tercantum di Dinas Kelautan perikanan atau di Dinas Kehutanan, Masing-masing Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) menangani langsung kedaerah sasaran. Responden yang terdapat pada Gambar 18 menyatakan bahwa 60 % program penanggulangan kerusakan hutan mangrove

dilakukan sendiri oleh pemkab Gresik. Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Gresik dengan melakukan pertemuan dengan staf terkait antara Penanggung Jawab Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan unsur terkait di kecamatan Ujung Pangkah. Bentuk koordinasi semacam ini memiliki beberapa keunggulan:

1) Pemerintah Kecamatan Ujung pangkah diberikan informasi bahwa akan ada kegiatan penanggulangan kerusakan mangrove didaerahnya;
2) Diperlukan partisipasi dari Pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah untuk ikut serta melaksanakan program tersebut dalam arti ikut melakukan pengawasan;
3) Keterlibatan pemerintah Kecamatan Ujung pangkah memiliki makna, bahwa pelaksanaan program penanggulangan kerusakan mangrove melibatkan juga pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah sebagai kegiatan “bersama”. Walaupun tanggung jawab anggaran di pemerintah Kabupaten Gresik.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan bahwa Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Pelimpahan Wewenang adalah (*delegation of authority*) penyerahan sebagian hak wewenang dari atasan kepada bawahan. Dalam pelaksanaannya penanggulangan kerusahan hutan mangrove di Kecamatan Ujung pangkah masih ditangani oleh Kabupaten Gresik. Keikutsertaan pemerintah kecamatan hanya bersifat mendukung.

4.5.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Daerah Kab. Gresik dan Pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah

Tugas pokok dan fungsi pemerintah menangani kerusakan hutan mangrove, responden menyatakan bahwa penanggulangan kerusakan hutan mangrove adalah pemerintah dan bukan masyarakat, termasuk biaya program menangani hutan Mangrove. Besarnya biaya berkisar dibawah Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Disamping sumber biaya berasal dari APBD, juga berasal dari APBN dan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dana CSR diperoleh dari perusahaan yang berlokasi di desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah.

Bentuk program penanggulangan kerusakan mangrove, responden berpendapat lebih banyak dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi atau penanaman mangrove merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan ekosistem laut. Secara perlahan dengan adanya hutan mangrove ini ekosistem laut akan berangsur-angsur membaik sebab akan menjadi tempat penetasan ikan, dan menangkis adanya adanya abrasi.

Pada dasarnya, pelaksanaan penanaman mangrove dalam bentuk program rehabilitasi hutan mangrove dapat menggugah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat pesisir mulai proses penanaman sangat diperlukan, mengingat salah satu faktor penting gagalnya penanaman mangrove adalah akibat dari ulah tangan–tangan warga pesisir itu sendiri. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diharapkan bisa ikut memotivasi, melatih dan mengawasi proses pemberdayaan masyarakat ini sampai paripurna. (Haryanto, 2008).

Sesuai dengan Perautan Pemerintah no. 19 tahun 2008, pasal 15 bahwa tugas pokok camat adalah sebagai berikut :

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Walapun tugas camat lebih ke arah koordinasi, maka dalam penanganan kerusakan hutan mangrove disamping ditangani oleh pemerintah Kabupaten Gresik, juga ditangani oleh swasta dan masyarakat. Dalam proses perencanaan penanggulangan kerusakan hutan mangrove responden banyak menyatakan bahwa rehabilitasi hutan mangrove sesuai keinginan masyarakat. Hal ini berarti bahwa program penanggulangan kerusakan hutan mangrove yang ditangani oleh pemerintah kecamatan Ujung Pangkah banyak melibatkan masyarakat.

Disamping itu program pemerintah Kabupaten Gresik yang perlu dikoordinasikan oleh pemerintah kecamatan Ujung Pangkah meliputi: koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan, koordinasi monitoring, koordinasi evaluasi, walaupun pendelegasian penanganan mangrove dari pemerintah

kabupaten Gresik ke pemerintah kecamatan Ujung Pangkah dilakukan hanya dari segi koordinasi dan bukan kepada pendelegasian kewenangan pelaksanaan kegiatan. Hal ini yang menyebabkan pemerintah Kecamatan tidak secara penuh kosentrasi mensukseskan program rehabilitasi mangrove.

4.6 Penyusunan Pohon Masalah

Penyusunan masalah merupakan rangkaian pelaksanaan PRA /RRA. Banyak istilah yang digunakan oleh para penulis untuk alat analisis ini. Scarvada, *et. al* (2004) mengistilahkan dengan nama *issues tree*. Silverman dan Silverman (1994) menggunakan istilah *systematic diagram* atau *tree diagram*, sedangkan Duffy *et. al* (2012) menggunakan istilah *tree diagrams*.

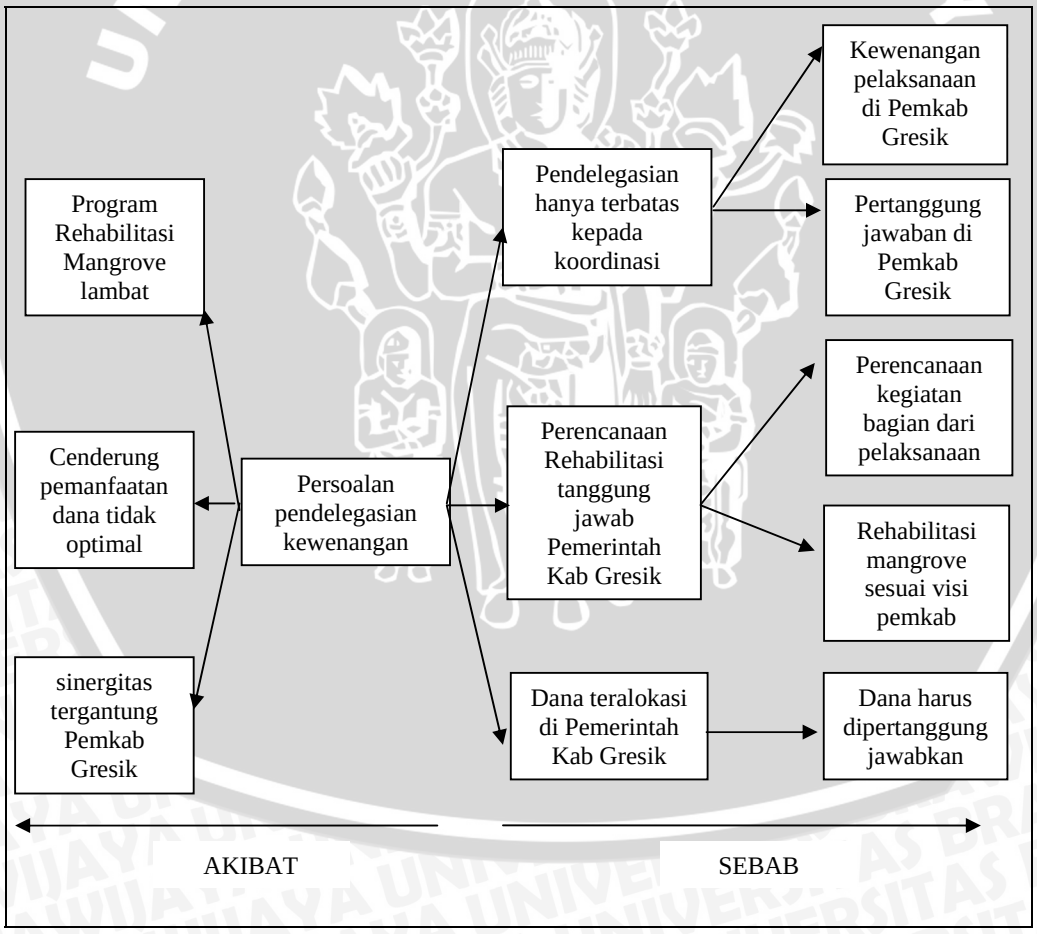

Gambar 36. Pohon Masalah

4.7 Analisis Tabel Urutan Masalah

Masalah	Luas Masalah	Akibat	Kemunculan	Skor	Ranking
Persoalan Pendelegasian kewenangan	Sangat luas dan menjadi masalah utama dalam sinergitas	a.Program rehabilitasi berjalan lambat b.Pemanfaatan dana tidak optimal c.Sinergitas ter gantung Pemkab Gresik	Masalah selalu muncul selama sumber masalah tidak ditangani	9	1
Pendelegasian hanya terbatas koordinasi	Bersifat temporer tergantung dari ada tidaknya kegiatan rehabilitasi mangrove	a. Pemerintah Keca matan Ujung Pangkah bersifat pasif; b. Pemerintah kecamatan Ujung Pangkah bersiap membantu tanpa berinovasi	Selalu terjadi sesuai tupoksi	7	2
Perencanaan Rehabilitasi tanggung jawab Pemerintah Kab. Gresik	Sangat luas mengingat ujung tombak pelayanan kepada masyarakat adalah Pemerintah Kecamatan	a. Persepsi masyara kat negative kepada pemerintah; b. Rehabilitasi tidak sesuai keinginan masyarakat	Selalu muncul pada saat masyarakat membicaraka n tentang kerusakan mangrove	8	1
Dana Teralokasi di Pemkab Gresik	Bersifat rutin karena setiap tahun terjadi pengalokasian dana di APBD Kab Gresik	a. Pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah tidak memilki dana; b. Kerusakan mangrove tidak dapat ditangani secara langsung, karena tergantung dari pemkab Gresik	Selalu muncul setiap tahun	6	2

Gambar 35. Penentuan nilai skor Berdasarkan skala Likert

	Derajat Ranking
0 – 3 Tidak Penting	3
4 – 7 Penting	2
8- 10 Sangat Penting	1

4.8 Pengelolaan Konservasi Mangrove

Pengelolaan konservasi mangrove di desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah berada pada kondisi dilema yang cukup sulit untuk direalisasi. Meskipun peluang untuk merealisasi masih ada. Yang menjadi masalahnya adalah persoalan arahan tata ruang atau zonasi yang belum jelas, kondisi kerusakan semakin parah, makin meningkatnya aktivitas ekonomi di desa Banyuurip dan perlambatan penanganan kerusakan hutan mangrove. Solusi masalah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Permasalahan dan solusi pengelolaan konservasi mangrove di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah

Kegiatan	Masalah	Solusi
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah	a. Belum ada arahan yang jelas tentang pengendalian konservasi hutan mangrove yang memiliki nilai penting	a. Perlu ada rencana zonasi sesuai rencana zonasi yang terdapat untuk rencana Sub kawasan Konservasi mangrove
	b. Kerusakan mangrove sema kin parah dan berdampak kepada menurunnya kualitas ekosistem pesisir.	b. Perlu penyusunan Perda tentang konservasi mangrove oleh Bupati Gresik yang perlu dijabarkan kepada peraturan Kecamatan dan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes)
	c.Aktivitas manusia sebagai penyebab kerusakan hutan mangrove.	c. Memperketat periji nan untuk pendir ian pelbagai macam aktivitas industri, permu kinan, pelabuhan;
	d.Perlambatan penanganan kerusakan hutan mangrove untuk dijadikan kawasan konservasi	d. Pemerintah Kecamatan Ujung pangkah tidak memiliki kewenangan mengatasi kerusakan mangrove karena tidak memiliki otoritas di APBD kab. Gresik.

Sumber: Hasil Analisis Observasi Lapangan

4.9 Sinergitas Pengelolaan Rehabilitasi Mangrove Antara Pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah Dengan Pemkab Gresik Desa Banyuurip

Berdasarkan pohon masalah diketemukan bahwa sinergitas antara pemerintah kecamatan Ujung Pangkah dengan pemerintah Kabupaten Gresik terkendala oleh masalah utama yaitu: persoalan pendelegasian kewenangan. Pemerintah Kabupaten Gresik tidak secara penuh mendelegasikan kewenangan untuk rehabilitasi mangrove di desa Banyuurip. Hal ini berakibat kepada:

a) Penanganan kerusakan mangrove melalui program rehabilitasi berjalan lambat. Sementara laju pertumbuhan kerusakan mangrove makin cepat.
b) Pemanfaatan dana yang berasal dari APBD Kabupaten Gresik tidak optimal dimanfaatkan, karena kewenangan pemerintah kecamatan Ujung Pangkah sebagai bawahan (perangkat daerah) Kabupaten Gresik hanya bersifat mendukung dan harus mensukseskan tujuan rehabilitasi mangrove yang berasal dari pemerintah Kabupaten Gresik.
c) Sebagai perangkat daerah dari pemerintah Kabupaten Gresik, dalam penanganan rehabilitasi mangrove bersifat pasif dan menunggu perintah. Padahal pemerintah kecamatan Ujung Pangkah merupakan ujung tombak pelayanan diwilayah kecamatan.

Berdasarkan akibat tersebut diatas, maka apabila ditelaah lebih lanjut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang kecamatan, bahwa di Bab IV pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Pada pasal 15 ayat 2 Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

a. perizinan;

b. rekomendasi;

c. koordinasi;

d. pembinaan;

e. pengawasan;

f. fasilitasi;

g. penetapan;

h. penyelenggaraan; dan

i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Agar sinergitas antara pemerintah kecamatan Ujung Pangkah dengan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)nya, maka perlu ada kewenangan yang dilimpahkan yang khusus berkaitan dengan pemeliharaan ekosistem pesisir. Hal ini mengingat kerusakan mangrove makin intensif. Disamping itu perizinan yang dilimpahkan kepada camat perlu diperketat pengeluarannya, agar investasi ke desa Banyuurip dapat dikendalikan.

4.10 Strategi Meningkatkan Sinergitas Antara Pemerintah Kabupaten Gresik Dan Pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah

Analisa SWOT merupakan sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan.

Penetapan strategi sinergitas pengelolaan mangrove antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah dilakukaan menggunakan analisis SWOT, dengan menggunakan beberapa instrumen yang diidentifikasi, yaitu kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancamana (*threat)*. Penyusunan analisis SWOT melalui beberapa tahap yaitu identifikasi faktor strategis internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman), dilanjutkan dengan pemberian skor pada masing-masing faktor. Selanjutnya ialah menyusun matriks SWOT untuk menentukan alternatif strategi berdasarkan prioritas yang diperoleh dari peringkat perhitungan skor. Sebelum disusun analisis SWOT disusun terlebih dahulu daftar kekuatan, daftar kelemahan, daftar peluang dan daftar ancaman, sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 8. Matriks SWOT

DAFTAR KEKUATAN 1. Camat memiliki Kewenangan Perizinan; 2. Camat memiliki hubungan dengan masyarakat dan swasta 3. Camat memiliki tugas umum pemerintahan dalam bentuk tugas koordinasi 4. Pengalaman selama ini Pemerintah Kecamatan berhasil penanggulangi kerusakan hutan mangrove	**DAFTAR KELEMAHAN** 1. Tidak ada pelimpahan kewenangan rehabilitasi mangrove dari pemerintah Kab Gresik ke Pemerintah Kecamatan; 2. Tidak ada biaya yang dilimpahkan dari Pemkab Gresik ke Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah 3. Persepsi negative masyarakat terhadap lambatnya pemulihan kerusakan mangrove; 4. Perencanaan Program rehabilitasi ditangani langsung Pemkab Gresik tanpa melibatkan pemerintah kecamatan Ujungpangkah
DAFTAR PELUANG 1. Pengetahuan masyarakat tentang program penanggulangan mangrove cukup baik; 2. Sensitivitas Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah cukup peka terhadap kerusakan mangrove 3. Perlu ada pengaturan tata ruang sebagai zonasi konservasi hutan mangrove dan zona budidaya 4. Peluang mendapatkan memobilisasi dana CSR	**DAFTAR ANCAMAN** 1. Intensitas Kegiatan Investasi makin meningkat; 2. Kerusakan lingkungan pesisir makin parah; 3. Kebijakan untuk pengendalian tata ruang tidak konsisten dilaksanakan;

4.10.1 Analisis Faktor Internal (IFAS)

Analisis faktor internal ini terdapat dua bagian yaitu kekuatan *(Strength)* dan kelemahan *(Weakness)* yang berada pada internal sinergitas antara pemerintah Kabupaten Gresik dengan Pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah :

1. Kekuatan *(Strength)*: meliputi: kewenangan pemberian perizinan untuk investasi di kecamatan Ujungpangkah khususnya di desa Banyuurip, hubungan yang dekat antara pemerintah kecamatan Ujungpangkah dengan masyarakat dan swasta (pelaku bisnis) mengingat pemerintah Kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan; kewenangan pemerintah kecamatan Ujungpangkah untuk melakukan berbagai macam koordinasi yang meliputi: koordinasi pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum, koordinasi penanganan dan penegakan pertauran per undang-undangan, dan lain-lain yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Kemudian koordinasi dalam penanggulangan kerusakan hutan mangrove yang menurut persepsi masyarkat mengatakan berhasil pemerintah kecamatan melakukan program rehabilitasi hutan mangrove. Penjabaran masing-masing faktor sebagai berikut:
   a. Kewenangan pemberian perizinan untuk investasi di kecamatan Ujungpangkah khususnya di desa Banyuurip; Pesatnya investasi didesa Banyuurip tidak terlepas dari pemberian izin investasi oleh pemerintah Kabupaten Gresik yang mungkin juga didelegasikan kepada kecamatan. Konsekuensi pemberian izin ini akan merubah tata ruang pesisir desa Banyuurip, khususnya untuk pengurangan hutan mangrove. Mudahnya pemberian izin investasi berdampak kepada degradasi lingkungan. Namun, apabila ada kemauan untuk memperketat pemberian izin investasi, maka cepatnya perubahan alih fungsi lahan akan dapat dikendalikan. Hal ini

merupakan kekuatan dari pemerintah kecamatan Ujung Pangkah untuk mengendalikan pemanfaatan alih fungsi lahan mangrove.

b. Hubungan yang dekat antara pemerintah kecamatan Ujungpangkah dengan masyarakat dan swasta (pelaku bisnis) mengingat pemerintah Kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan; Hubungan atau relasi dengan masyarakat merupakan asset sosial. Aset sosial ini apabila digerakkan kepada satu tujuan akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Hal ini akan membangkitkan semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarkat termasuk pelaku usaha.

c. Kewenangan pemerintah kecamatan Ujungpangkah untuk melakukan berbagai macam koordinasi yang meliputi: koordinasi pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi penanganan dan penegakan pertauran per undang-undangan, dan lain-lain yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Kemampuan koordinasi camat menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah kecamatan membangun wilayahnya. Koordinasi yang melekat kepada kewenangan pemerintah kecamatan dapat dipergunakan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat melakukan rehabilitasi mangrove yang rusak.

d. Kemudian koordinasi dalam penanggulangan kerusakan hutan mangrove yang menurut persepsi masyarkat mengatakan berhasil pemerintah kecamatan melakukan program rehabilitasi hutan mangrove. Pengalaman pemerintah Kecamatan Ujungpangkah yang berhasil melakukan rehabilitasi mangrove mendapat apresiasi dari masyarakat. Untuk itu apabila ada program rehabilitasi yang dana dan programnya berasal dari pemerintah Kabupaten Gresik dapat didelegasikan kewenangannya kepada pemerintah Kecamatan. Hal ini mengingat tingkat keberhasilannya cukup

tinggi, apabila dibandingkan dengan ditangani langsung oleh pemerintah Kabupaten Gresik.

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan yang terjadi meliputi: tidak ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten Gresik kepada pemerintah kecamatan Ujung pangkah untuk melakukan rehabilitasi kerusakan mangrove. Disamping itu pemerinthan kecamatan Ujung Pangkah tidak memiliki dana yang teralokasi di APBD untuk program rehabilitasi mangrove. Dana program rehabilitasi di APBD kab Gresik teralokasi kepada SKPD Dinas kelautan dan perikanan atau SKPD Dinas Kehutanan atau Badan Lingkungan Hidup. Timbulnya persepsi masyarakat yang negative kepada pemerintah kecamatan Ujung pangkah disebabkan karena pemerintah Ujungpangkah dianggap lambat menangani kerusakan hutan mangrove. Disamping itu perencanaan program oleh SKPD Kabupaten Gresik ditangani sendiri berdasarkan tupoksi SKPD yang bersangkutan.

a. Tidak ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten Gresik kepada pemerintah kecamatan Ujung pangkah untuk melakukan rehabilitasi kerusakan mangrove. Kelemahan
b. Pemerinthan kecamatan Ujung Pangkah tidak memiliki dana yang teralokasi di APBD untuk program rehabilitasi mangrove.
c. Dana program rehabilitasi di APBD kab Gresik teralokasi kepada SKPD Dinas kelautan dan perikanan atau SKPD Dinas Kehutanan atau Badan Lingkungan Hidup.
d. Timbulnya persepsi masyarakat yang negative kepada pemerintah kecamatan Ujung pangkah disebabkan karena pemerintah Ujung pangkah dianggap lambat menangani kerusakan hutan mangrove.

e. Perencanaan program oleh SKPD Kabupaten Gresik ditangani sendiri berdasarkan tupoksi SKPD yang bersangkutan.

4.10.2 Analisis Faktor Eksternal (EFAS)

Sebelum strategi diterapkan, perencanaan strategi harus menganalisis lingkungan Faktor Eksternal Strategi (EFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang dan ancaman. Dalam analisis faktor eksternal ini terdiri dua bagian yaitu peluang *(Opportunities)* dan ancaman *(Threats)* yang berada pada sinergitas pengelolaan mangrove antara Pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah dan Pemerintah Gresik.

Adapun penjelasan faktor eksternal tersebut adalah :

a. Peluang *(Opportunities)*: Pengetahuan masyarakat tentang program penanggulangan kerusakan hutan mangrove makin tinggi, sensitivitas pemerintah kecamatan Ujung Pangkah untuk menangani kerusakan hutan mangrove. pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten gresik. Pengaturan tata ruang yang akan mengakomodasikan zonasi pengelolaan kawasan konservasi dan budidaya. Memobilisasi "*Corporate Social Responsibility*" (CSR).
b. Ancaman (Threats): Bahwa telah terjadi peningkatan intensitas investasi yang makin meningkat dari tahun ke tahun. Kerusakan lingkungan pesisir makin intensif mengingat alih fungsi lahan makin meningkat. Adanya karakter koruptif yang saat ini menjadi "kebiasaan" yang terjadi tidak hanya di birokrasi tetapi juga di masyarakat.

4.10.3 Matriks Pembobotan Arahan IFAS dan EFAS

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi relasi-relasi sumberdaya ekowisata dengan sumberdaya yang lain. Oleh sebab itu, semua pihak khususnya masyarakat lokal perlu mengetahui apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh kawasan dan obyek ekowisata tersebut (Damanik dan Weber, 2006).

Tabel 9. Matriks Faktor Strategi Internal (IFAS)

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan (Strength)			
1. Kewenangan Perizinan (S1)	0,13	4	0,52
2. Hubungan Pemerintah Kecamatan dengan masyarakat dan swasta (S2)	0,1	3	0,3
3. Memiliki kewenangan koordinasi (S3)	0,17	4	0,68
4. Pengalaman berhasil menangani kerusakan hutan mangrove (S4)	0,13	3	0,39
Jumlah	0,53		1,89
Kelemahan (Weakness)			
1. Tidak ada pelimpahan kewenangan (W1)	0,17	4	0,68
2. Tidak memiliki biaya di APBD (W2)	0,1	3	0,3
3. Persepsi negative masyarakat tentang Lambatnya penanganan kerusakan mangrove Oleh pemerintah Kecamatan Ujung pangkah (W3)	0,17	4	0,68
4. Perencanaan rehabilitasi oleh SKPD (W4)	0,03	3	0,09
Jumlah	0,47		1,75
T o t a l	1,00		3,64

Penilaian terhadap kondisi internal pada masalah sinergitas pengelolaan mangrove antara pemerintah kecamatan Ujungpangkah dengan Pemkab Gresik diperoleh total nilai faktor kekuatan sebesar 1,89 dan nilai faktor kelemahan 1,75.

Tabel 10. Matriks Faktor Strategi Eksternal (EFAS)

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang (Opportunity)			
1. Pengetahuan Masyarakat tentang Penanggulangan mangrove (O1)	0,12	3	0,36
2. Sensitivitas tinggi Pemerintah Kecamatan (O2)	0,14	3	0,42
3. Pelimpahan Kewenangan dari Pemkab Gresik (O3)	0,25	4	1
4. Pengaturan Tata Ruang (O4)	0,04	3	0,12
5. Mobilisasi dana CSR (O5)	0,18	4	0,72
Jumlah			
Ancaman (Threats)			
1. Intensitas kegiatan investasi di pesisir makin meningkat (T1)	0,18	4	0,72
2. Kerusakan Lingkungan pesisir makin intensif(T2)	0,04	3	0,12
3. Kebijakan untuk pengendalian tata ruang tidak konsisten dilaksanakan (T3)	0,07	2	0,14
Jumlah			
T o t a l	1		3,6

Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (Peluang dan Tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (Kekuatan dan Kelamahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemua antara faktor-faktor internal dan eksternal.

4.10.4 Matriks SWOT "Strategic Issues"

Analisis seluruh faktor internal dan eksternal yang ada. Dari gambar dibawah ini dapat dihasilkan empat macam strategi organisasi dengan karakteristiknya masing-masing, yakni sebagai berikut :

Tabel 11. SWOT "*Strategic Issues"*

EKSTERNAL / INTERNAL	OPPORTUNITY 1. Pengetahuan Masyarakat tentang Penanggulangan mangrove. 2. Sensitivitas tinggi Pemerintah Kecamatan. 3. Pelimpahan Kewenangan dari Pemkab Gresik. 4. Pengaturan Tata Ruang. 5. Mobilisasi dana CSR	THREATS 1. Intensitas kegiatan investasi di pesisir makin meningkat (T1) 2. Kerusakan Lingkungan pesisir makin intensif (T2) 3. Kebijakan untuk pengendalian tata ruang tidak konsisten dilaksanakan; (T3)
STRENGTH 1. Kewenangan Perizinan (S1) 2. Hubungan Pemerintah Kecamatan dengan masyarakat dan swasta (S2) 3. Memiliki kewenangan koordinasi (S3) 4. Pengalaman berhasil menangani kerusakan hutan mangrove (S4)	STRATEGI S-O • Pendelegasian kewenangan dari pemkab Gresik ke Pem Kec Ujung pangkah untuk program rehab mangrove; • Pembiayaan bersama APBD dan CSR	STRATEGI S-T • Memperketat perizinan untuk investasi baru; • Kepatuhan pemerintah kecamatan terhadap tata ruang; • Partisipasi masyarakat untuk program rehabilitasi
WEAKNESS 1.Tidak ada pelimpahan kewenangan (W1) 2. Tidak memiliki biaya di APBD (W2) 3. Persepsi negative masyara kat tentang Lambatnya penanganan kerusakan mangrove Oleh pemerintah Kecamatan Ujung pangkah (W3) 4. Perencanaan rehabilitasi oleh SKPD (W4)	STRATEGI W-O • Sinergitas memerlukan pendelegasian kewenangan; • Termasuk pendelegasian dana; • Pendelegasian perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi	STRATEGI W-T • Ketaatan terhadap kebijakan penataan ruang; • Perencanaan Rehabilitasi mangrove dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta

Keterangan:

1. S-O : Gunakan kekuatan untuk meraih peluang
2. S-T : Gunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
3. W-O : Mengatasi kelemahan untuk meraih peluang
4. W-T : Mengatasi kelemahan untuk atasi ancaman

Tabel 12. Penilaian Alternatif Strategi

No	Alternatif Strategi	Keterkaitan	Jumlah Skor	Peringkat
Strategi S – O				
1	Pendelegasian kewe nangan dari pemkab Gresik ke Pem Kec Ujung pangkah untuk program rehabilitasi mangrove;	(S1 + S2+S3 + O3 + O4)	2,62	1
2	Pembiayaan bersama APBD dan CSR	(S2 + S3 + 05)	1,7	5
Strategi S – T				
1.	Memperketat perizinan untuk investasi baru	S1+S2+S3+T1	2,22	2
2	Kepatuhan pemerintah kecamatan terhadap tata ruang;	S2+S3+T3	1,12	8
3	Partisipasi masyarakat untuk program rehabilitasi	S2+S3+S4+T3	1,51	6
Strategi W – O				
1.	Sinergitas memerlukan pendelegasian kewenangan;	W1 + W3 + O2	1,78	4
2.	Termasuk pendelegasian dana;	W2 + O5	1,02	10
3.	Pendelegasian perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi	W1 + W4 + O4+O3	1,89	3
Strategi W – T				
1.	Ketaatan terhadap kebijakan penataan ruang	W1 + W4 + T2	1,19	7
2.	Perencanaan Rehabilitasi mangrove dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta	W3 + W4 +T2+ T3	1,03	9

Tabel 13. Matriks Pembobotan SWOT

Kekuatan (Strength)	Skor	*Kelemahan (Weakness)*	Skor
1. Kewenangan Perizinan (S1) 2. Hubungan Pemerintah Kecamatan dengan (S2) masyarakat dan swasta 3. Memiliki kewenangan koordinasi (S3) 4. Pengalaman berhasil menangani kerusakan hutan mangrove (S4)	0,52 0,3 0,68 0,39	1. Tidak ada pelimpahan kewenangan (W1) 2. Tidak memiliki biaya di APBD (W2) 3. Persepsi negative masyarakat tentang Lambatnya penanganan kerusakan mangrove Oleh pemerintah Kecamatan Ujung pangkah (W3) 4. Perencanaan rehabilitasi oleh SKPD (W4)	0,68 0,3 0,68 0,09
Jumlah	1,89	Jumlah	1,75
Peluang (Opportunities)		*Ancaman (Threats)*	
1. Pengetahuan Masyarakat tentang Penanggulangan mangrove (O1) 2. Sensitivitas tinggi Pemerintah Kecamatan (O2) 3. Pelimpahan Kewenangan dari Pemkab Gresik (O3) 4. Pengaturan Tata Ruang (O4) 5. Mobilisasi dana CSR (O5)	0,36 0,42 1 0,12 0,72	1. Intensitas kegiatan investasi di pesisir makin meningkat (T1) 2. Kerusakan Lingkungan pesisir makin intensif(T2) 3. Kebijakan untuk pengendalian tata ruang tidak konsisten dilaksanakan (T3)	0,72 0,12 0,14
Jumlah	2,62	Jumlah	0,98

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bobot masing-masing variabel adalah S = 1,89; W = 1,75; O= 2,62 dan T = 0,98. Variabel W dan T akan menghambat sinergitas antara Pemkab Gresik dengan Kecamatan Ujung pangkah. Selisih antara S – W = 1,89 – 1,75 = 0,14 adalah sumbu X. Sedangkan selisih antara O – T = 1,64.

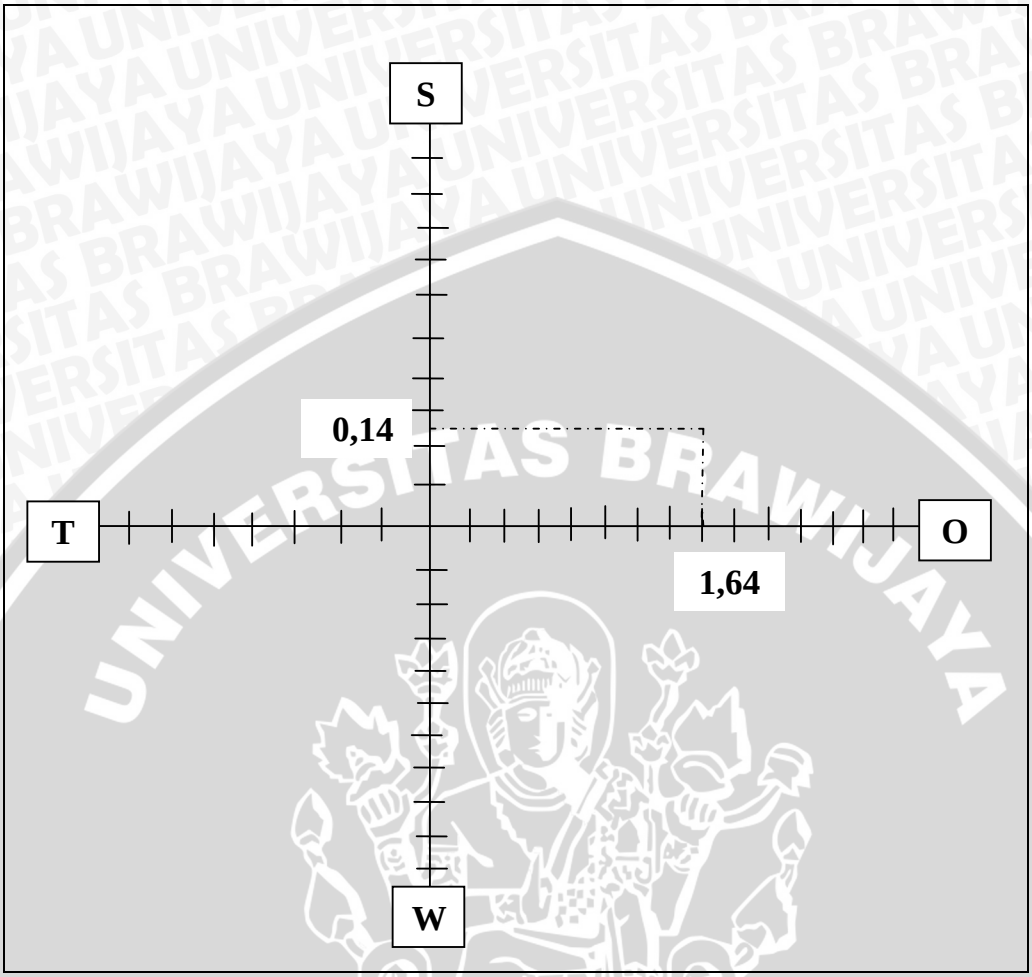

Gambar : Kuadran Analisis SWOT

Posisi strategi meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah terletak pada kuadran 1 (positif, positif). Posisi ini menandakan bahwa sinergitas antara pemerintah Kabupaten Gresik dengan Pemerintah Kecamatan Ujung pangkah dapat kuat dan berpeluang serta bersifat progresif. Progresif artinya kedua organisasi pemerintahan tersebut dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan perbaikan kebijakan dengan memperbesar pendelegasian kepada pemerintah Kecamatan Ujungpangkah secara maksimal. Untuk itu maka strategi berorientasi kepada:

1. Pemerintah kecamatan Ujung pangkah diberikan delegasi penuh oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk melaksanakan Program Rehabilitasi mangrove di wilayahnya termasuk di desa Banyuurip melalui SKPD terkait.
2. Pendelegasian tugas dan wewenang ke pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah tidak hanya bersifat tugas saja tetapi juga, harus dilakukan pendelegasian dana melalui APBD Kab. Gresik dari SKPD terkait.
3. Untuk itu maka perencanaan rehabilitasi diserahkan juga sepenuhnya kepada pemerintah kecamatan Ujungpangkah dengan mengajak partisipasi masyarakat dan swasta.
4. Pertanggung jawaban keuangan, administrasi dan manajemen pelaksanaan kegiatan rehabilitasi akan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kecamatan Ujungpangkah.
5. Pemerintah desa di Banyuurip sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat perlu juga diikut sertakan oleh pemerintah Kecamatan Ujungpangkah untuk melakukan rehabilitasi mangrove dengan mengikutsertakan masyarakat dan sektor swasta.
6. Koordinasi intensif antara pemerintah Kecamatan Ujungpangkah dan pemerintah Desa perlu juga dilakukan sinergitas dengan pendelegasian kepada pemerintah desa.
7. Otonomi desa yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang no. 6 tahun 2014 dan dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah no. 43 tahun 2014 tentang Desa sesuai pasal 33 butir (d) dan (e) bahwa kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pengelolaan konservasi mangrove termasuk upaya melakukan rehabilitasi mangrove di desa Banyuurip kecamatan Ujungpangkah menunjukkan upaya penanganan yang sangat lambat dimata masyarakat. Hal ini disebabkan karena penanganan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi mangrove melalui proses yang masih ditangani secara penuh oleh SKPD terkait di Pemerintah kabupaten Gresik. Penanganan tersebut meliputi proses perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan.
2. Sinergitas pengelolaan rehabilitasi mangrove antara pemerintah kecamatan Ujung pangkah dengan SKPD di Pemerintah Kabupaten Gresik di Desa Banyu Urip menunjukkan sinergitas belum berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.
3. Strategi meningkatkan sinergitas antara SKPD di pemerintah Kabupaten Gresik dengan pemerintah Kecamatan Ujung pangkah bertumpu kepada aspek pendelegasian kewenangan penuh termasuk aspek pendanaannya.

5.2 Saran

Untuk lebih membumikan aspek sinergitas ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang aspek sinergitas antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa. Hal ini mengingat pemerintah desa sesuai Undang-undang No. 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dirinya sendiri, walaupun dalam hirarki pemerintahan masih berada dalam koordinasi pemerintah kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik. 2014. Perencanaan Pembangunan Daerah Wilayah Pesisir yang meliputi Kecamatan di Kabupaten Gresik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2013. Kecamatan Ujung Pangkah Dalam Angka 2013. Data BPS Kabupaten Gresik.

Chambers, Robert. 2001. Participatory Rural Appraisal Appraisal (PRA)- The New Tyranny. Bill Cooke and Uma Khotari. 2ed. Books.

Damanik, J dan H. Weber. 2006. Perencanaan Ekowisata. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada dan C.V Andi Offset.

Dahuri, Rokhmin. et. al. 2008. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT Pradnya Paramita: Jakarta.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik. 2014. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Ditjen Kelautan, pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan PT Bina Marina Nusantara. 2006. Panduan Pengambilan Data Dengan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participotory Rural Appraisal (PRA). Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya-Satker Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (Coremap II). Vol2.

Duffy, Gace L., Scott A. Laman, Pradip Mehta, Goving Ramu, Natalia Scriabina, dan Keith Wagoner. 2012. *Beyond The Basics: Seven New Quality Tools Help Innovate, Communicate, and Plan*. http:/www. Asqqm.org/ resourcesmodule /download_resource /id/881/.

Hadani Nawawi dan Mimi Martini. 1994. Penelitian Kualitatif menggunakan cara kerja dengan metode sistematik.

Haryanto, Rudi. 2008. Rehabilitasi Hutan mangrove: Pelestarian Ekosistem Pesisir Pantai dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Majalah karsa, Vol VIV No. 2 Oktober 2008.

Keputusan Presiden Republik Indonesia. 1990. Nomor 32 tentang perubahan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dari Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. 2008. Nomor 17 mengenai Kawasan Konservasi dan Pulau – Pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah. 2007. Nomor 60 tentang Kawasan Konservasi dan Sumber Daya Ikan.

Presiden Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Profil Sumber Daya Wilayah Pesisir Kecamatan Ujungpangkah. 2010. Sumber Daya Pesisir Kecamatan Ujungpangkah.

Pusat Litbang Hutan dan Konservasi. 2010. Pengelolaan hutan Mangrove. Rencana Penelitian Integratif (RPI) Tahun 2010-2014. Februari 2010.

Rudianto. 2014. Analisis Restorasi Ekosistem Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis *Co-Management*: Studi Kasus di Kecamatan Ujung Pangkah dan Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. April 2014.

Scarvada, A.J., Tatiana Bouzdine-Chameeva, Susan Meyer Goldstein, Julie M.Hays, Arthur V. Hill. 2004. *A Review of the Causal Mapping Practice and Research Literature.* Second World Conference on POM and 15th Annual POM Conference, Cancun, Mexico, April 30 – May 3, 2004.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Surakhmad, W. 1985. Pengantar Penelitian Ilmiah-Dasar Metode Teknik. Tarsito, Bandung.

Surat Keputusan Bupati Nomor KPTS.173/KPTS/V/2013 tentang pembentukan kelompok masyarakat baru di kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.

Surat Keputusan Bupati Nomor 313/KPTS/XII/2008 tentang kelompok pengawas masyarakat (POKWASMAS).

Susanto, Apri, Etwin Kuslati, Sabarini. 2011. Analisis Kebijakan Perlindungan Pesisir Berbasis Mangrove. Component II. Advocate for The Implementation of mangrove-Based Coastal Defense Strategies as Alternative to Hard Engineering Approach.

Silverman, Steven N. dan Lori L. Silverman.1994. *Using Total Quality Tools for Marketing Research: A Qualitative Approach for Collecting, Organizing,and Analyzing Verbal Response Data*.http:/www. epiheirimatikotika.gr/elibrary/marketresearch/using tools for marketing research.pdf.

Tomlinson. P.B. 1986. The Botany of mangrove. Cambride University Press.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1. 2014. Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5. 1990. Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26. 2007. Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32. 2004. Tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45. 2009. Tentang Pengawasan Perikanan dan Konservasi pada poin 3.

LAMPIRAN 1: Tahapan Melakukan Analisis SWOT

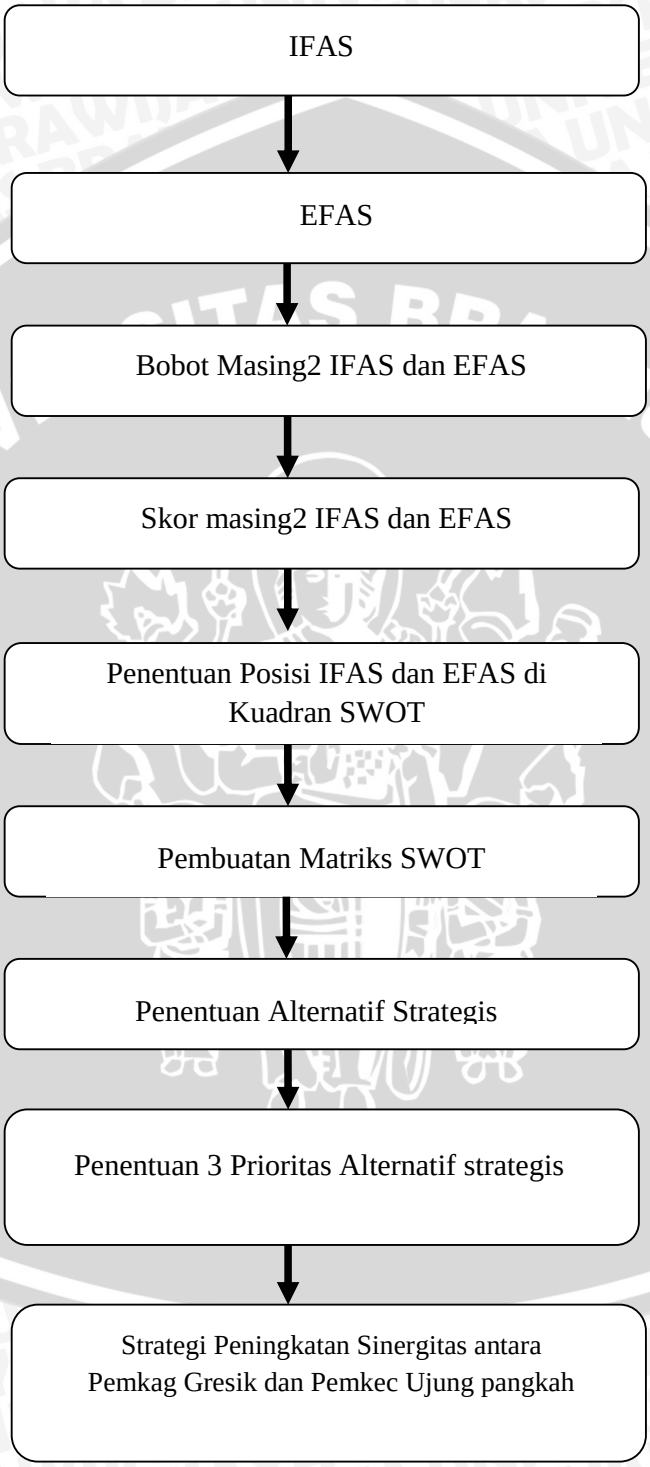

LAMPIRAN 2 : Strategi Internal

Simbol	KEKUATAN (STRENGHT)	Tingkat Kepentingan
S1	Kewenangan Perizinan	Sangat Penting
S2	Hubungan Pemerintah Kecamatan dengan masyarakat dan swasta	Penting
S3	Memiliki kewenangan koordinasi	Penting
S4	Pengalaman berhasil menangani kerusakan hutan mangrove	Sangat Penting
	KELEMAHAN (WEAKNESS)	
W1	Tidak ada pelimpahan kewenangan	Sangat Penting
W2	Tidak memiliki biaya di APBD	Penting
W3	Persepsi negative masyarakat tentang Lambatnya penanganan kerusakan angrove Oleh pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah	Sangat Penting
W4	Perencanaan rehabilitasi oleh SKPD	Penting

Strategi Eksternal

Simbol	PELUANG (OPPORTUNITY)	Tingkat Kepentingan
O1	Pengetahuan Masyarakat Tentang Penanggulangan Mangrove	Sangat Penting
O2	Sensitivitas Tinggi Pemerintah Kecamatan terhadap kerusakan mangrove	Penting
O3	Pelimpahan Kewenangan dari Pemkab Gresik	Sangat Penting
O4	Pengaturan Tata Ruang	Penting
O5	Mobilisasi dana CSR	Sangat Penting
	THREATS (ANCAMAN)	
T1	Intensitas kegiatan investasi makin meningkat	Sangat penting
T2	Kerusakan lingkungan pesisir makin intensif	Penting
T3	Kebijakan untuk pengendalian tata ruang tidak konsisten dilaksanakan;	Penting

LAMPIRAN 3 : Penilaian Bobot Faktor Strategis Internal dan Eksternal

FAKTOR YANG LEBIH URGEN									Jumlah	Bobot
Simbol	S1	S2	S3	S4	W1	W2	W3	W4		
S1		S1	S3	S4	W1	S1	S1	S1	4	0,13
S2	S2		S3	S2	W1	W2	W3	S2	3	0,1
S3	S1	S3		S3	W1	S3	S3	S3	5	0,17
S4	S4	S4	S3		W1	S4	W3	S4	4	0,13
Simbol										
W1	W1	W1	W1	S4		W2	W1	W1	5	0,17
W2	S1	W2	S3	S4	W1		W2	W2	3	0,1
W3	W3	W3	W3	S4	W1	W3		W3	5	0,17
W4	S1	S2	S3	S4	W1	W4	W3		1	0,03
Jumlah Total									30	1

FAKTOR YANG LEBIH URGEN									Jumlah	Bobot
Simbol	O1	O2	O3	O4	O5	T1	T2	T3		
O1		O1	O3	O4	O1	T1	O1	O1	3	0,12
O2	O1		O3	O2	O2	T1	O2	O2	4	0,14
O3	O3	O3		O3	O3	O3	O3	O3	7	0,25
O4	O1	O2	O3		O5	O5	O4	O3	1	0,04
O5	O5	O5	O3	O5		T1	O5	O5	5	0,18
Simbol										
T1	T1	O2	O3	T1	T1		T1	T1	5	0,18
T2	O1	O2	O3	O4	O5	T1		T2	1	0,04
T3	O1	02	03	T3	O5	T1	T3		2	0,07
Jumlah Total									28	1

LAMPIRAN 4 : Kuisioner

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMERINTAHAN KAB GRESIK

Nama yang diwawancara :
Instansi :
Jabatan :

Pertanyaan

1) Bagaimana tugas dan pokok instansi bapak / ibu menangani persoalan hutan mangrove di Kabupaten Gresik, apakah:
   a) terkait langsung;
   b) terkait tidak langsung;
   c) tidak terkait sama sekali;

2) Apabila terkait baik langsung maupun tidak langsung, apakah ada program untuk menangani hutan mangrove:
   a) ada program diatas Rp 1 Milyar;
   b) ada program antaraRp. 500 juta – Rp. 1 milyar;
   c) ada program dengannilai rata-rata antara 200 juta – Rp. 500 juta;
   d) ada program dengannilai rata-rata dibawahRp. 200 juta;
   e) tidakada.

3) Sumber dana dari kegiatan program mangrove berasal dari:
   a) Dana APBN;
   b) Dana APBD Propinsi;
   c) Dana APBD kab. Gresik;
   d) Sumber dana lain misalnya dana dari CSR.

4) Apakah dana mangrove terprogram dan teralokasi setiap tahun:
   a) Ya, teralokasi setiap tahun;
   b) Hanya apabila hutan mangrove memerlukan penanganan;
   c) Bersifat sewaktu-waktu (temporer);
   d) Apabila ada dana dari APBN khusus mangrove.

5) Apakah program hutan mangrove berupa:
   a) Rehabilitasi mangrove;
   b) Pemeliharaan mangrove;
   c) Perluasan mangrove;
   d) Penyediaan bibit mangrove.

6) Apakah program mangrove tersebut dikerjakan :
   a) Secara sewa kelola dinas;
   b) Dikerjakan pihak ketiga;
   c) Diserahkan kepada masyarakat setempat;
   d) diserahkan kepada pihak kecamatan.

7) Bagaimana proses perencanaan mengelola mangrove di Kabupaten Gresik;
   a) Hasil musrenbang Kabupaten;
   b) Program Dinas yang melekat untuk mangrove;
   c) Keinginan dan kebutuhan masyarakat;
   d) Program mangrove dari pemerintah pusat.

8) Bagaimana hubungan perencanaan program mangrove antara Dinas di pemkab Gresik dengan pemerintah kecamatan:
   a) Selalu berkoordinasi perencanaan antara Pemkab Gresik dengan Pemerintah kecamatan:
   b) Kadang-kadang berkoordinasi perencanaan antara Pemkab Gresik dengan Pemerintah kecamatan;
   c) Tidak pernah berkoordinasi perencanaan antara Pemkab Gresik dengan Pemerintah kecamatan;

9) Bagaimana hubungan pelaksanaan program mangrove antara Dinas di pemkab Gresik dengan pemerintah kecamatan:
   a) selalu berkoordinasi pelaksanaan antara Pemkab Gresik dengan Pemerintah kecamatan:
   b) Kadang-kadang berkoordinasi pelaksanaan antara Pemkab Gresik dengan Pemerintah kecamatan;
   c) Tidak pernah berkoordinasi pelaksanaan antara Pemkab Gresik dengan Pemerintah kecamatan;

10) Bagaimana hubungan monitoring program mangrove antara Dinas di pemkab Gresik dengan pemerintah kecamatan:
   a) Selalu berkoordinasi monitoring antara Pemkab Gresik dengan Pemerintah kecamatan:
   b) Kadang-kadang berkoordinasi monitoring antara Pemkab Gresik dengan Pemerintah kecamatan;
   c) Tidak pernah berkoordinasi monitoring antara Pemkab Gresik dengan Pemerintah kecamatan;

11) Bagaimana hubungan evaluasi program mangrove antara Dinas di pemkab Gresik dengan pemerintah kecamatan:
    a. Selalu berkoordinasi evaluasi antara Pemkab Gresik dengan Pemerintah kecamatan:
    b. Kadang-kadang berkoordinasi evaluasi antara Pemkab Gresik dengan Pemerintah kecamatan;
    c. Tidak pernah berkoordinasi evaluasi antara Pemkab Gresik dengan Pemerintah kecamatan;

12) Apakah pemerintah kabupaten Gresik selalu mendelegasikan penanganan mangrove kepada pemerintah kecamatan:
    a) Selalu mendelegasikan penanganan mangrove kepada pemerintah kecamatan;
    b) Kadang-kadang mendelegasikan penanganan mangrove kepada pemerintah kecamatan;
    c) Tidak pernah mendelegasikan penanganan mangrove kepada pemerintah kecamatan.

13) Apakah pendelegasian kepada pemerintah kecamatan dari pemerintah Kabupaten gresik untuk pengelolaan mangrove:
    a) Sepenuhnya pendelegasian penanganan kepada pemerintah kecamatan;
    b) Kadang-kadang pendelegasian penanganan kepada pemerintah kecamatan;
    c) Tidak sepenuhnya pendelegasian penanganan kepada pemerintah kecamatan;

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMERINTAHAN KECAMATAN UJUNG PANGKAH

Nama yang diwawancara :
Instansi :
Jabatan :

Pertanyaan

1) Bagaimana tugas dan pokok Pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah menangani persoalan hutan mangrove di wilayahnya:
   a) Sangat erat sekali;
   b) Erat sekali;
   c) Tergantung penugasan pemerintah Kabupaten Gresik;
   d) Tergantung keinginan masyarakat menanggapi persoalan mangrove;

2) Sampai seberapa sensitive pemerintah kecamatan Ujung Pangkah menangani kerusakan mangrove:
   a) Sangat sensitive;
   b) Sensitive;
   c) Tidak sensitive;
   d) Tergantung instruksi Pemerintah Kabupaten Gresik;

3) Pembiayaankerusakanmangrove bersumberdari:
   a) Dana APBN;
   b) Dana APBD kab. Gresik;
   c) Dana CSR;
   d) Swadaya masyarakat.

4) Apakah Pemerintah Kab. Gresik mendelegasikan sepenuhnya penanganan kerusakan mangrove kepada pemeritah kecamatan Ujung pangkah;
   a) Pendelegasian sepenuhnya;
   b) Setengah-setengah pendelegasian;
   c) Kadang-kadang didelegasikan dan kadang-kadang tidak didelegasikan;
   d) Tidak didelegasikan sama sekali.

5) Apabila didelegasikan penanganan program mengatasi kerusakan mangrove, apakah diberikan juga petunjuk pelaksanaannya (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) penanganan mangrove:
   a) Ada juklak dan juknis;
   b) Ada juklak tidak ada juknis;
   c) Tidak ada juklak dan juknis sama sekali;
   d) Ditangani tanpa juklak dan juknis.

6) Apakah pemerintah kecamatan Ujungpangkah merencanakan sendiri program kerusakan mangrove:
   a) Ya, merencanakan sendiri;
   b) Tidak, merencanakan sendiri;
   c) Merencanakan bersama masyarakat;

7) Asal program penanggulangan kerusakan mangrove itu darimana?
   a) Dari masyarakat Ujungpangkah;
   b) Dari Pemkab Gresik;
   c) Dari inisiatif Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah;
   d) Dari Pemerintah Pusat Kementrian di pusat.

8) Apabila program penanggulangan kerusakan mangrove dari pemerintah kabupaten Gresik bagaimana apakah ada koordinasi:
   a) Ya, ada koordinasi;
   b) Kadang-kadang pemkab Gresik melakukan koordinasi;
   c) Tidak melakukan koordinasi sama sekali.

9) Apabila program penanggulangan kerusakan mangrove yang berasal dari Pemkab Gresik kemudian dialokasikan ke Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah, bagaimana bentuk koordinasinya dengan pemerintah kecamatan Ujungpangkah:
   a) Melalui pertemuan Bupati dengan para kepala SKPD dan para Camat;
   b) Melalui surat instruksi dari Bupati Gresik kepada Camat Ujungpangkah;
   c) Melalui pertemuan staf terkait pemkab Gresik dengan Camat dan para staf Camat Ujungpangkah;
   d) Melalui pertemuan rutin antara Bupati dengan Camat.

10) Apakah camat atau perangkat camat terkait merasa nyaman dengan program penanggulangan kerusakan mangrove oleh Pemkab Gresik:
   a) Sangat nyaman;
   b) Nyaman;
   c) Tidak nyaman;
   d) Membingungkan.

11) Bagaimana pemerintah kecamatan Ujungpangkah melakukan kegiatan perencanaan kerusakan mangrove:
   a) Dilakukan sendiri dengan bimbingan pemerintah Kab. Gresik;
   b) Dilakukan bersama masyarakat;
   c) Mengajak sektor swasta untuk menanggulangi kerusakan mangrove;
   d) Dilakukan secara bersama antara pemerintah Kecamatan Ujung pangkah, masyarakat sekitar mangrove, LSM dan sektor swasta;
   e) dilakukan bersama hanya dengan LSM.

12) Bagaimana selama ini program penanganan kerusakan mangrove dijalankan:
    a) Dilakukan sendiri oleh Pemkab Gresik;
    b) Dilakukan bersama antara Pemkab Gresik dengan pemerintah Kecamatan Ujungpangkah;
    c) Didelegasikan oleh pemkab Gresik ke pemerintah kecamatan Ujungpangkah;
    d) Dilakukan bersama dengan masyarakat dan swasta;
    e) Dilakukan sendiri oleh sektor swasta

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT KECAMATAN UJUNG PANGKAH

Nama yang diwawancara :
Usia :
Alamat :
Jabatan :

Pertanyaan

1) Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap kerusakan mangrove di kecamatan Ujungpangkah:
   a) Sangat parah;
   b) Parah;
   c) Biasa saja;
   d) Tidak tahu.

2) Apa yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan hutan mangrove dikecamatan Ujungpangkah:
   a) Ulah manusia;
   b) Ulah alam;
   c) Tidak tahu.

3) Kalau kerusakan akibat ulah manusia, menurut Bapak/Ibu apa saja:
   a) Ditebang untuk dijadikan tambak;
   b) Ditebang untuk kayunya diambil kayu bakar; ditebang untuk keperluan lain (seperti untuk bangunan, pembuatan jalan, dll);
   c) Dipergunakan untuk pembangunan rumah/restorant;
   d) Untuk pembangunan industri;
   e) Untuk pembangunan pariwisata;
   f) Tidak tahu;

4) Apakah pemerintah kecamatan Ujungpangkah telah berbuat untuk mengatasi kerusakan hutan mangrove?
   a) Sangat perhatian;
   b) Biasa-biasa saja;
   c) Kadang-kadang ada perhatian;
   d) Tidak ada perhatian sama sekali.

5) Apakah kerusakan hutan mangrove ada peran dari pemerintah kecamatan Ujungpangkah:
   a) Peran sangat besar;
   b) Tidak ada peran sama sekali;
   c) Diserahkan masyarakat untuk mengatasi;
   d) Biasa-biasa saja.

6) Apakah selama ini bapak/ibu mengetahui ada program penanggulangan kerusakan hutan mangrove:
   a) Ya, mengetahui;
   b) Tidak, mengetahui sama sekali;
   c) Hanya dari kabar atau pembicaraan orang lain;

7) Bagaimana menurut bapak/ibu program penanggulangan kerusakan hutan mangrove saat ini:
   a) Sangat berhasil;
   b) Tidak berhasil;
   c) Biasa-biasa saja.

8) Bagaimana menurut bapak/ibu program penanggulangan kerusakan hutan mangrove yang berasal dari pemerintah Kabupaten Gresik?
   a) Baik;
   b) Biasa-biasa saja;
   c) Tidak baik.

9) Bagaimana menurut bapak/ibu koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Kecamatan Ujungpangkah:
   a) Terkoordinasi baik;
   b) Biasa-biasa saja;
   c) Biasa-biasa saja;
   d) Tidak terkoordinir dengan baik;
   e) Semrawut.

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN UJUNG PANGKAH

Nama yang diwawancara :
Usia :
Alamat :
Jabatan :

Pertanyaan

1) Luas mangrove yang mengalami kerusakan di wilayah bapak Kepala Desa berapa hektar? Yang baik berapa hektar serta yang sedang berapa hektar?
2) Apa pendapat bapak mengenai penyebab kerusakan mangrove?
3) Menurut bapak, dampak apa yang ditimbulkan dari kerusakan mangrove?
4) Siapa yang melakukan rehabilitasi kerusakan mangrove di wilayah bapak?
5) Apakah pemerintah Kabupaten Gresik memiliki program rehabilitasi kerusakan mangrove di wilayah bapak? Dan sepengetahuan bapak dimulai dari tahun berapa?
6) Bagaimana koordinasi antara pemerintah Kabupaten Gresik dengan pemerintah Kecamatan Ujungpangkah di desa Banyuurip?
7) Bagaimana menurut pendapat bapak mengenai partisipasi masyarakat mengenai kerusakan mangrove?
8) Bagaimana pemerintah desa Banyuurip memprogramkan rehabilitasi mangrove dan sumber pembiayaannya darimana?
9) Apakah dalam perencanaan rehabilitasi mangrove pemerintah desa Banyuurip diajak serta untuk merencanakan rehabilitasi mangrove oleh Kecamata Ujungpangkah maupun pemerintah Kabupaten Gresik?
10) Apakah ada pemantauan dari pemerintah desa Banyuurip untuk memantau kerusakan mangrove?
11) Apakah pemerintah desa menerima dana CSR dari pihak swasta?
12) Bagaimana menurut pendapat bapak kepala desa Banyuurip tentang pelaksanaan program rehabilitasi mangrove oleh pemerintah Kabupaten Gresik?

LAMPIRAN 4 : Dokumentasi

Gambar 36. Panorama Pesisir Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik

Gambar 37. Kantor Kepala Desa Banyuurip

Gambar 38. Penebangan Kayu Mangrove

Gambar 39. Sampah Kerang Hijau di Desa Banyuurip di Kec. Ujungpangkah

Gambar 40. Jalan Menuju Kawasan Mangrove Kecamatan Ujungpangkah

Gambar 41. Pengisian Quisioner di Kantor Kecamatan Ujungpangkah

Gambar 42. Foto Bersama Bapak M. Tholib Selaku Wakil Ketua Pokwasmas sekaligus Sekertaris Rukun Nelayan Tirta Buana

Gambar 43. Kegiatan Penanaman Mangrove Melibatkan Pengawasan Dari POKWASMAS, Nelayan Sari Laut Pangkahkulon dan BLH

Gambar 44. Kegiatan Nelayan di Desa Banyuurip yang berlokasi di Kawasan Mangrove

Gambar 45. Lokasi Budidaya Kerang Hijau di Perairan Desa Banyuurip

LAMPIRAN 5 : Kerapatan Mangrove di Desa Banyuurip

Skema Kerja

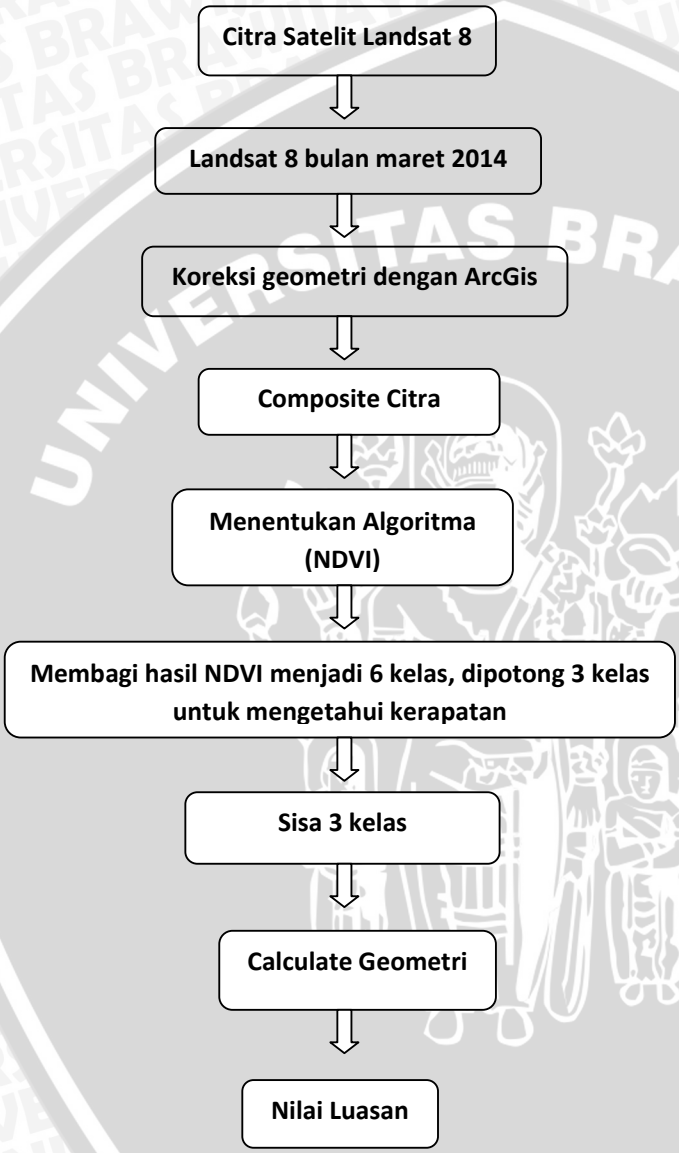

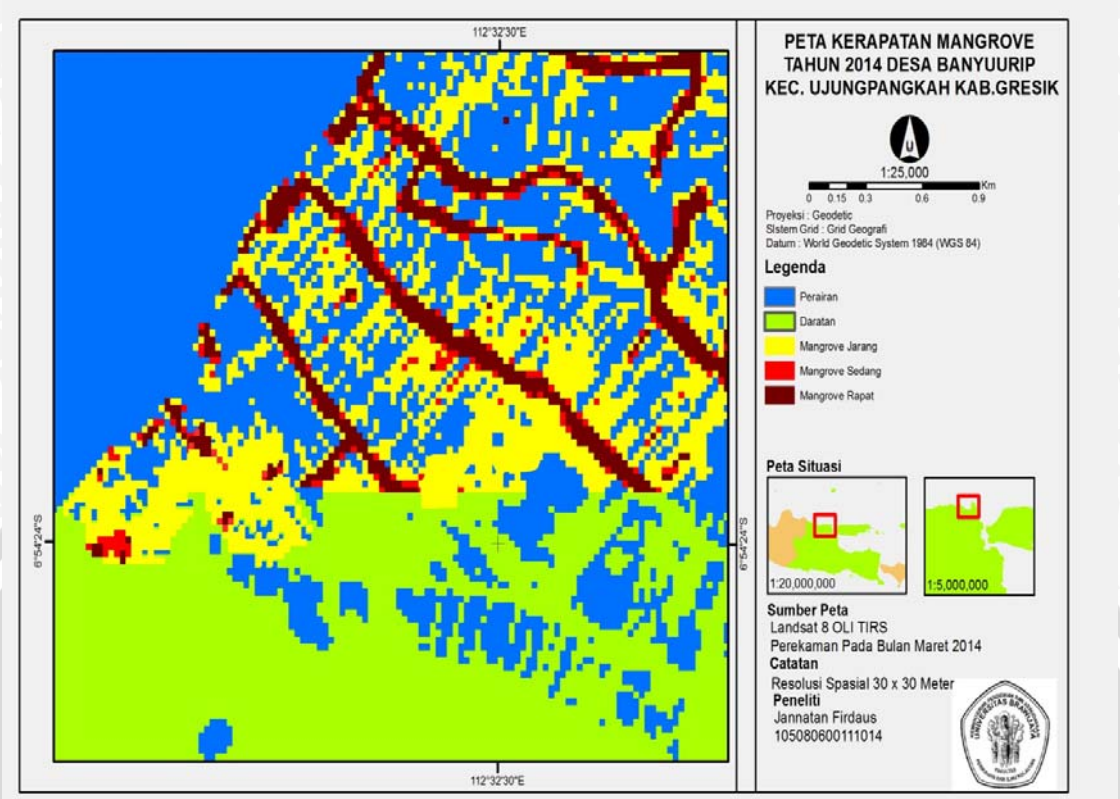

Gambar 46. Peta Kerapatan Mangrove